



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD)

TAHUN 2023



**DINAS PEMBERDAYAAN MASYRAKAT DAN DESA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

BAB III

URUSAN KONKUREN, FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

A. URUSAN KONKUREN:

1. Ringkasan Urusan Wajib :

a. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penyelenggara urusan wajib adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur.

b. Program dan Kegiatan :

Tahun Anggaran 2023 pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur terdapat 2 (dua) urusan terdiri dari :

1. Urusan OPD (Non Urusan) terdiri dari 4 (Empat) Program, 10 (Sepuluh) Kegiatan dan 32 (Tiga Puluh Dua) Sub Kegiatan :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi terdiri dari :

❖ Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan sub kegiatan :

- ✓ Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- ✓ Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- ✓ Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- ✓ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- ✓ Evaluasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah

❖ Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat daerah dengan sub kegiatan :

- ✓ Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- ✓ Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi Keuangan SKPD
- ✓ Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
- ✓ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan akhir Tahun SKPD
- ✓ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD

❖ Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat daerah dengan sub kegiatan :

- ✓ Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

❖ Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan sub kegiatan :

- ✓ Pendataan dan Pengolahan administrasi kepegawaian
- ✓ Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
- ✓ Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

❖ Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan sub kegiatan :

- ✓ Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- ✓ Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- ✓ Penyediaan Bahan/Material
- ✓ Fasilitas Kunjungan Tamu
- ✓ Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

❖ Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan sub kegiatan:

- ✓ Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- ✓ Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- ✓ Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

❖ Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan sub kegiatan :

- ✓ Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- ✓ Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- ✓ Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

b. Program Penataan Desa terdiri dari:

❖ Kegiatan Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan , dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat dengan sub kegiatan:

- ✓ Fasilitas Kabupaten/Kota dan Desa dalam Rangka Penataan Des

c. Program Adminitrasi Pemerintahan Desa terdiri dari:

❖ Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan sub kegiatan:

- ✓ Fasilitas Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali kota yang Mengatur Desa
- ✓ Fasilitas Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan.
- ✓ Pembinaan Aparatur Pemerintah

d. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat terdiri dari:

- ❖ Kegiatan Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan :
 - ✓ Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
 - ✓ Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
 - ✓ Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga

2. Tingkatan Capaian/Hasil

Program Pemberdayaan dan Pemberdayaan Masyarakat, Kegiatan :

1) Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam Rangka Penataan Desa

❖ Pembentukan/Penataan Desa di Provinsi NTT

- a. Telah dilakukan klarifikasi usulan Penatan Desa Tingkat nasional bagi 10 Desa di Provinsi NTT yang terdiri dari 9 (sembilan) Desa di Kabupaten Ende dan 1 (satu) Desa di Kabupaten Ngada oleh Kementerian Dalam Negeri RI melalui Ditjen Bina Pemerintahan Desa pada tanggal 27 Februari 2023. Hasil verifikasi dokumen tersebut terdapat 3 (tiga) Desa persiapan yang perlu dilengkapi dokumen administrasinya.
- b. Pembentukan 22 Desa Persiapan di Kabupaten Sumba Barat, telah mendapatkan persetujuan Gubernur Nusa Tenggara Timur.

Salah satu tugas pokok Bidang Pemerintahan Desa adalah melakukan evaluasi dan verifikasi factual terhadap berbagai dokumen, sarana, dan prasarana yang berkaitan dengan proses pemekaran desa yang terdapat di seluruh wilayah NTT.

Perubahan status pemekaran desa dari desa induk ke desa baru merupakan murni aspirasi masyarakat desa melalui berbagai pertimbangan dan prosedur yang berlaku. Apabila aspirasi masyarakat dipandang telah memenuhi syarat sesuai dengan persyaratan yang

berlaku, maka Dinas PMD kabupaten, Dinas PMD Provinsi, dan Kementerian Dalam Negeri melakukan berbagai evaluasi, penilaian, dan Verifikasi faktual sebagai langkah awal untuk menjadi desa yang defenitif.

Tahapan pembentukan desa adalah sebagai berikut:

- Usulan pembentukan desa baru (proposal dari desa induk) kepada Bupati dengan dilampirkan Berita Acara Musyawarah Desa disertai dengan Notulen dan daftar hadir peserta rapat.
- Bupati mengevaluasi usulan pembentukan desa baru yang diajukan
- Jika layak (memenuhi syarat sesuai pasal 7 Permendagri No. 1 Tahun 2017) Bupati mengusulkan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Desa Persiapan dilampirkan dokumen persyaratan kepada Gubernur.
- Gubernur melalui Dinas PMD Provinsi sesuai tugas dan fungsinya melakukan penyerasian substansi Rancangan Peraturan Bupati tersebut dengan Peraturan perundang-undangan dan jika memenuhi syarat diterbitkan Kode Register Desa Persiapan oleh Gubernur.
- Setelah terbitnya Kode Register Desa Persiapan, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa Persiapan dengan jangka waktu antara 1 s/d 3 tahun.
- Setelah jangka waktu 1 s/d 3 tahun Bupati mengevaluasi desa persiapan yang layak menjadi desa dan dibuatkan dalam rancangan Perda kemudian diusulkan kepada Gubernur.
- Gubernur melalui Dinas PMD Provinsi sesuai tugas dan fungsinya melakukan penyerasian substansi Rancangan Peraturan Daerah tersebut dengan peraturan perundang-undangan dan melakukan evaluasi (verifikasi faktual) terhadap usulan tersebut.
- Berdasarkan evaluasi (verifikasi factual) Gubernur mengeluarkan Nomor Registrasi dan mengusulkan ke Menteri Dalam Negeri untuk memperoleh Kode Desa.
- Berdasarkan usulan pembentukan desa oleh Gubernur, Menteri Dalam Negeri RI melakukan evaluasi (verifikasi faktual).
- Berdasarkan hasil evaluasi Menteri Dalam Negeri menetapkan Kode Desa.

- Jika Kode Desa telah ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri maka Bupati menetapkan Peraturan Daerah tentang Desa Definitif.

❖ **Evaluasi/Verifikasi Faktual Penataan Desa**

Tujuan dilaksanakan evaluasi terhadap Desa-desa Persiapan menjadi Desa di Kabupaten adalah :

1. Mengetahui tingkat perkembangan dan kelayakan Desa persiapan menjadi Desa.
2. Mengetahui proses dan mekanisme pembentukan desa yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten.
3. Memenuhi salah satu persyaratan usulan Gubernur kepada Kementerian Dalam Negeri untuk mendapatkan kode desa.

Evaluasi atau Verifikasi lapangan yang dilakukan tim adalah :

a. Verifikasi administrasi

Melakukan pemeriksaan dokumen dalam hal : persyaratan pembentukan, prosedur pembentukan, perkembangan dan kelengkapan dokumen usulan sebagaimana yang disyaratkan.

b. Verifikasi teknis

Melakukan pengamatan langsung ke lokasi berdasarkan data administrasi dalam hal : persyaratan pembentukan, prosedur pembentukan, perkembangan dan kelengkapan dokumen.

Sebagai referensi Tim dalam verifikasi, dibuatkan dalam bentuk format/instrumen sebagai panduan dalam verifikasi lapangan, sebagaimana terlampir.

Sumber informasi dalam verifikasi di Desa persiapan ada 3 (tiga) sasaran utama yaitu : Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Desa Induk serta Pemerintah Desa Persiapan, dengan unsur-unsur yaitu Bupati, Kepala Dinas PMD Kabupaten, Camat, Kepala Desa Induk, BPD, Penjabat Kepala Desa dan Perangkat Desa Persiapan, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Adat Desa setempat.

Syarat terbentuknya desa dari desa persiapan menjadi desa definitif Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Permendagri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa, bahwa Pembentukan desa harus memenuhi persyaratan yaitu :

1. Batas Usia desa induk paling sedikit 5 tahun terhitung sejak pembentukan;
2. Jumlah penduduk yaitu wilayah Nusa Tenggara Timur, Maluku dan Maluku Utara paling sedikit 1.000 jiwa atau 200 KK;
3. Wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antar wilayah;
4. Sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat desa;
5. Memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya ekonomi pendukung;
6. Batas wilayah desa yang dinyatakan dalam bentuk peta desa yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota;
7. Sarana dan prasarana bagi pemerintahan desa dan pelayanan publik;
8. Tersedianya dana operasional, penghasilan tetap dan tunjangan lainnya bagi perangkat pemerintah desa sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan; dan
9. Cakupan wilayah desa terdiri atas dusun atau dengan sebutan lain.

2) Fasilitas Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali kota yang Mengatur Desa.

Terkait dengan pelaksanaan fungsi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Provinsi sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka setiap rancangan Perda tentang Desa dan Kelurahan yang diusulkan oleh Kabupaten/Kota, sebelum diassistensi ke Biro Hukum Setda Provinsi NTT, terlebih dahulu dikonsultasi substansi materinya ke Dinas PMD sebagai dinas teknis, sesuai Surat Gubernur NTT kepada Bupati/Walikota se Provinsi NTT Nomor : BU.140/08/PMD/2022 tanggal 9 Agustus 2022.

Pelaksanaan fungsi tersebut, dapat disampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten yang menyampaikan Ranperda terkait dengan Desa sepanjang Tahun 2023 perlu dibahas bersama Dinas PMD Provinsi Nusa Tenggara Timur, tidak semuanya dibahas karena disesuaikan dengan peraturan menteri yang telah ditetapkan. Setiap Ranperda yang telah dibahas bersama, dibuatkan surat hasil penyerasian/konsultasi, selanjutnya disampaikan kepada Pemda setempat untuk penyerasian substansi materi yang telah diajukan.

Penyerasian substansi Rancangan Peraturan Bupati Tentang Kewenangan Desa dilaksanakan pada bulan September, Oktober dan Nopember. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi NTT dengan anggaran yang ada dalam DPA SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi NTT untuk kegiatan Fasilitasi Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa. Penyerasian tersebut dilakukan bersama Pemerintah Kabupaten Manggarai dan Manggarai Timur untuk melakukan penyerasian dan berdiskusi bersama tim di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kabupaten yang berkaitan dengan isi materi Rancangan Peraturan Daerah yang membutuhkan penyempurnaan sesuai dengan tata penulisan Rancangan Peraturan Daerah yang benar.

Kegiatan penyerasian Rancangan Peraturan Daerah ini dilakukan agar terjadi penyelarasan, penyesuaian yang berkaitan dengan isi Rancangan Peraturan daerah yang telah dibuat oleh Kabupaten. Hasilnya, kemudian dikonsultasikan dengan Biro Hukum Provinsi NTT untuk diperbaiki atau disempurnakan berbagai kekurangan sesuai dengan tata cara penyusunan yang benar.

Adapun Tahapan Penyusunan Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa adalah sebagai berikut :

1. Kabupaten menyusun draf Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa.
2. Kabupaten dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten melakukan konsultasi ke Provinsi pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi berkaitan dengan penyempurnaan isi Rancangan Peraturan Daerah sesuai peraturan yang berlaku.
3. Setelah dilakukan penyerasian dengan Provinsi maka Provinsi akan mengeluarkan Berita Acara Hasil Penyerasian Ranperda tentang Pembentukan Desa sehingga kabupaten segera melakukan perbaikan terhadap beberapa hal yang perlu disesuaikan dan disempurnakan.

4. Setelah itu kabupaten melakukan konsultasi Ranperda tentang Pembentukan Desa ke Biro Hukum dan Kementerian Dalam Negeri RI, c.q. Dirjen Bina Pemerintahan Desa untuk mendapatkan beberapa hal yang perlu di sempurnakan.
5. Gubernur Nusa Tenggara Timur menerbitkan rekomendasi hasil koordinasi Ranperda tentang Pembentukan Desa sebagai dasar bagi Bupati untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa.

3) Fasilitas Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan

Kegiatan Fasilitas Evaluasi perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan dalam tahun anggaran 2023 telah dilaksanakan sesuai petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, dan telah menetapkan kategori juara berdasarkan Surat keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : BU. 100.3.3.1/07/DPMD/2023, tanggal 3 Juli 2023, sebagai berikut :

NO	NAMA DESA, KECAMATAN & KABUPATEN	KATEGORI JUARA LOMBA DESA
1	Desa Blangmerang, Kecamatan Pantar Barat, Kabupaten Alor	Juara I
2	Desa bali Loku, Kecamatan Wanu Kaka, Kabupaten Sumba Barat	Juara II
3	Desa Siomeda, Kecamatan Rote tengah, Kabupaten Rote Tengah	Juara III

4) Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa

Kegiatan ini tidak dapat dijalankan karena kondisi keuangan daerah tidak mencukupi sehingga kegiatan tersebut tidak dapat dilaksanakan.

5) Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa

Kegiatan ini tidak dapat dijalankan karena kondisi keuangan daerah tidak mencukupi sehingga kegiatan tersebut tidak dapat dilaksanakan.

6) Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna

Kegiatan ini berupa perakitan peralatan TTG, selanjutnya dipromosikan pemasarannya untuk dijual kepada berbagai pihak dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Berdasarkan DPA perakitan/pembuatan alat pengering daun kelor dan alat penepung daun kelor berjumlah 16 buah yaitu 8 unit alat pengering daun kelor dan 8 unit alat penepung daun kelor. Namun, karena kondisi keuangan yang direalisasi hanya untuk memproduksi 8 unit alat pengering daun kelor. Perakitan alat pengering daun kelor dilaksanakan dalam semester I sebanyak 4 unit dan semester II sebanyak 4 unit.

Pengembangan peralatan TTG, telah direncanakan tahapannya yaitu:

- a. Persiapan pelaksanaan, pembuatan TOR, RAB, dan desain alat
- b. Pengadaan bahan dan peralatan pendukung.
- c. Perakitan Mesin Pengering daun kelor dan mesin penepung daun kelor.
- d. Uji coba alat yang selesai di rakit.
- e. Pelaporan pelaksanaan.

➤ Waktu dan Tempat

a. Waktu

Semester I

Waktu pengerjaan untuk menghasilkan 4 unit alat pengering daun kelor adalah selama 13 Hari Kerja dari tanggal 27 Februari s.d 10 Maret 2023 sesuai dengan Surat Tugas Nomor: 094/03/DPMD 4.1/2.2023 Tanggal 24 Februari 2023 dan pada tanggal 20,21 dan 24 Maret sesuai Surat Tugas Nomor: 094/84/DPMD 4.1/3.2023 Tanggal: 16 Maret 2023.

Semester II

Waktu pengerjaan untuk menghasilkan 4 unit alat pengering daun kelor adalah selama 22 Hari Kerja sesuai dengan Surat Tugas Nomor: 094/19/DPMD 4.1/2.2023 Tanggal 17 November 2023, Surat Tugas Nomor: 094/20/DPMD 4.1/3.2023 Tanggal: 4 Desember 2023 dan Surat Tugas Nomor: 094/374/DPMD 4.1/12.2023.

b. Tempat

Tempat pelaksanaan kegiatan adalah Puspem TTG Noelbaki.

➤ Hasil yang diperoleh

Selama Tahun 2023, dari perencanaan pembuatan 16 unit alat pengering dan pengepung daun kelor, yang sudah dibuat sebanyak 8 unit alat pengering daun kelor. Maka dilakukan proses pemasaran dengan memberikan informasi dan promosi kepada beberapa pihak pengusaha yang menjalankan aktifitas produksi berbahan baku daun kelor.

Dari hasil promosi dan pengujian bersama pihak pengusaha produk daun kelor alat pengering daun kelor yang diproduksi di PUSPEM TTG Noelbaki cukup diminati dan siap dibeli karena telah memenuhi standar sesuai ketentuan dan kebutuhan pasar. Dari 8 Unit alat pengering daun kelor yang sudah diproduksi, terdapat 2 unit yang terjual sebagai salah satu sumber PAD. Sedangkan untuk 4 unit alat pengering daun kelor terselesaikan tanggal 22 Desember 2023.

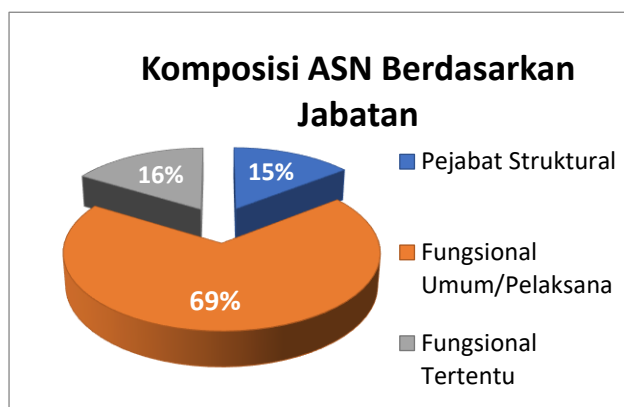
3. Jumlah Pegawai

Jumlah Pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi NTT Per 31 Desember 2023 berdasarkan kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan, jumlah pejabat struktural dan fungsional sebanyak 55 orang.

a. Komposisi ASN Berdasarkan Jabatan

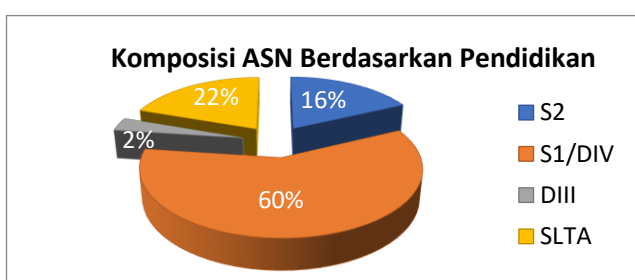
Gambar 3.1
Komposisi ASN Berdasarkan Jabatan

JABATAN	JUMLAH	%
Pejabat Struktural	8	14.55
- Eselon II	1	1.82
- Eselon III	5	9.09
- Eselon IV	2	3.64
Fungsional Tertentu	9	16.36
Fungsional Umum	38	69.09
Jumlah	55	100



Gambar 3.2
Komposisi ASN Berdasarkan Strata Pendidikan

PENDIDIKAN	JUMLAH	%
S2	9	16.36
S1/DIV	33	60.00
DIII	1	1.82
SLTA	12	21.82
JUMLAH	55	100



4. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Alokasi anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun Anggaran 2023 sebesar, Rp. **9,051,591,780,-** terdiri dari Belanja Operasional Rp. **9,051,591,780,-** dengan realisasi Belanja Operasional Rp. **7,401,465,357,-** (81.77%)

Tabel 3.1

Rincian Alokasi Anggaran dan Realisasi per 31 Desember 2022

No.	Uraian Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
BELANJA DAERAH				
I.	Belanja Operasi	9,051,591,780,-	7,401,465,357,-	81.77
	1. Belanja Pegawai	5,477,863,000,-	4,868,022,947,-	88.87
	2. Belanja Barang dan Jasa	3,573,728,780,-	2,533,442,410,-	70.89
II.	Belanja Modal	0.-	0.-	0
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0.-	0.-	0
Jumlah Belanja		9,051,591,780,-	7,401,465,357,-	81.77

Alokasi Anggaran Program/Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2

Alokasi Anggaran Dinas PMD Tahun 2023

KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
1	2	3	4	
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	9,051,591,780	7,401,465,357	81.77
1	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	9,051,591,780	7,401,465,357	81.77
2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	7,430,570,290	6,637,182,506	89.32
2.13.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	74,042,439	49,896,414	67.39
2.13.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8,211,600	8,211,600	100
2.13.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	12,867,500	12,448,600	96.74
2.13.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	12,825,600	8,355,600	65.15
2.13.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	23,375,039	4,130,039	17.67
2.13.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16,762,700	16,750,575	99.93
2.13.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5,429,564,900	4,832,824,746	89.01

2.13.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5,383,663,000	4,787,171,447	88.92
2.13.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	8,756,500	8,600,000	98.21
2.13.01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	3,784,600	3,784,000	99.98
2.13.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	15,445,800	15,369,299	99.50
2.13.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	17,915,000	17,900,000	99.92
2.13.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1,272,100	1,112,600	87.46
2.13.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1,272,100	1,112,600	87.46
2.13.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	22,026,800	14,330,900	65.06
2.13.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4,686,900	4,684,400	99.95
2.13.01.1.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	4,882,900	4,882,500	99.99
2.13.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	12,457,000	4,764,000	38.24
2.13.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	212,530,691	131,114,682	61.69
2.13.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	524,400	512,000	97.64
2.13.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	13,470,000	13,469,600	100.00
2.13.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	29,947,900	28,968,154	96.73
2.13.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	36,456,000	36,431,728	99.93
2.13.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	132,132,391	51,733,200	39.15
2.13.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,552,936,160	1,474,899,847	94.97
2.13.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2,500,000	2,500,000	100
2.13.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	149,891,680	123,355,067	82.30
2.13.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1,400,544,480	1,349,044,780	96.32
2.13.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	138,197,200	133,003,317	96.24
2.13.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	122,520,000	119,823,317	97.80
2.13.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8,530,000	8,530,000	100
2.13.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	7,147,200	4,650,000	65.06
2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA	44,132,080	31,188,100	70.67
2.13.02.1.01	Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat	44,132,080	31,188,100	70.67
2.13.02.1.01.03	Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa	44,132,080	31,188,100	70.67

2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	529,622,800	133,529,000	25.21
2.13.04.1.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	529,622,800	133,529,000	25.21
2.13.04.1.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali kota yang Mengatur Desa	16,858,800	7,506,600	44.53
2.13.04.1.01.08	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	53,867,400	8,557,000	15.89
2.13.04.1.01.10	Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa	458,896,600	117,465,400	25.60
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	1,047,266,610	599,565,751	57.25
2.13.05.1.01	Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1,047,266,610	599,565,751	57.25
2.13.05.1.01.05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	3,415,500	0	-
2.13.05.1.01.06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	103,143,500	80,068,000	77.63
2.13.05.1.01.09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	940,707,610	519,497,751	55.22

5. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah

Semua Program / Kegiatan dan Sub kegiatan yang ada pada DPA OPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur, telah disusun sesuai dengan Renstra Dinas PMD dan sejalan dengan RPJMD Provinsi NTT Tahun 2018-2023, sebagai akibat adanya pengurangan anggaran sehingga pada beberapa kegiatan terdapat pengurangan indikator output akibat pengurangan anggaran, namun pengurangan indikator kegiatan tersebut tetap mempertimbangkan keberhasilan pencapaian indikator program yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi NTT.

a. Kondisi Sarana Prasarana yang digunakan

a.	Kondisi fasilitas gedung kantor masih baik
c.	Fasilitas air dan Listrik tersedia,
d.	Mobil operasional tersedia sehingga sangat menunjang aktivitas kinerja,
e.	Sebagian komputer dan printer dalam kondisi rusak dan rusak ringan sehingga sebagian pegawai menggunakan notebook/laptop pribadi,
f.	Ruangan atau tempat khusus untuk menata / menyimpan dokumen – dokumen dinas masih kurang memadai.

b. Permasalahan dan Solusi dalam Pelaksanaan Program dan Kegiatan

1) Permasalahan :

Masih ada beberapa target kinerja yang belum mencapai karena keterbatasan anggaran sehingga ada program kegiatan yang tidak dapat dijalankan.

2) Solusi :

Solusi yang ditempuh oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu koordinasi intern antara pengelola keuangan dengan pelaksana kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur lebih ditingkatkan lagi, sehingga Program dan kegiatan yang telah direncanakan dapat berjalan sesuai dengan jadwal yang telah disusun pada RENSTRA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 s/d 2023.

c. Hal lain yang perlu dilaporkan

Selain pelaksanaan kegiatan urusan wajib di atas didukung pula dengan Program OPD antar lain :

Tabel 3.3
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

No	Kegiatan	Alokasi Dana (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Fisik (%)	Ket
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan sub kegiatan	74.042.439,00	49.896.414,00	67,38	
2	Administrasi Keuangan Perangkat daerah.	5.429.564.900,00	4,787,171,447,00	88,92	
3	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat daerah dengan	1.272.100,00	1.112.600,00	87,46	
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	22.026.800,00	14.330.900,00	65,06	
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	212.530.691,00	131.114.682,00	61,69	
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.552.936.160,00	1.474.899.847,00	94,97	
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	138.197.200,00	133.003.317,00	96.24	

B. FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH:

C. URUSAN PEMERINTAHAN UMUM:

D. INDIKATOR KINERJA KUNCI:

1. Indikator Kinerja Kunci Hasil (Lampiran 2.2.2) :

- ❖ Persentase pengentasan desa tertinggal di Provinsi NTT adalah sebesar 13,43% berdasarkan data IDM tahun 2022 s/d 2023. Pada periode tahun 2018 sampai tahun 2022 rata-rata peningkatan status desa berkembang adalah sebanyak 238,15 desa. Pada akhir tahun 2023 desa tertinggal di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebanyak 1.131 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022 yang berjumlah 1,303 desa.
- ❖ Persentase peningkatan desa berkembang menjadi desa maju di Provinsi NTT adalah sebesar ,7% berdasarkan data IDM tahun 2022 s/d 2023. Pada periode tahun 2018-2022, rata-rata peningkatan desa maju adalah 80,25 desa. Pada akhir tahun 2022, jumlah desa maju adalah 259 desa dan mengalami peningkatan pada tahun 2023 menjadi 355 desa.

Tabel 3.4

Data capaian Indikator Kinerja kunci diatas dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Status Desa	Th. 2018	Th. 2019	Th. 2020	Th. 2021	Th. 2022	Th. 2023
1	Mandiri	1	1	1	3	12	27
2	Maju	34	55	79	132	259	355
3	Berkembang	593	785	1.049	1.181	1.371	1.546
4	Tertinggal	1.743	1.776	1.746	1.592	1.303	1.131
5	Sangat Tertinggal	655	409	151	118	81	78
TOTAL		3.026	3.026	3.026	3.026	3.026	3.137

2. Indikator Kinerja Kunci Output (Lampiran 2.2.1) :

- ❖ Jumlah Desa yang terfasilitasi dalam kerjasama antar Desa

Kerjasama antar Desa di Provinsi Nusa Tenggara Timur baru sebatas kerjasama dalam bidang Ekonomi dalam bentuk BUMDes bersama yang merupakan kerjasama antar Desa dalam 1 Kecamatan, sampai Tahun 2023 jumlah Desa yang terfasilitasi dalam kerjasama antar Desa sebanyak 330 Desa.

- ❖ Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya. Pada tahun 2022, jumlah kerja sama antar desa berjumlah 314 desa. Pada Tahun 2023, berjumlah 330 desa. Sehingga selisih jumlah kerja sama desa tahun 2023 dikurangi tahun 2022 adalah 16 desa.
- ❖ Di Provinsi NTT terdapat 12.256 lembaga kemasyarakatan melaksanakan kegiatan Posyandu aktif dan PKK aktif desa dan Kelurahan serta lembaga adat.
- ❖ Di Provinsi NTT terdapat 348 desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan PKK aktif.

a. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan :

b. Urusan Pemerintahan Umum :

c. Tataran Pelaksanaan Kebijakan :

BAB IV
REALISASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP)
TAHUN 2022

Dinas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur melaksanakan turut mendukung Program Nasional yang merupakan Rencana Kerja Pemerintah yaitu :

1. Transfer Dana Desa (APBN);
2. Badan Usaha Milik Desa (APBD);

BAB V
TUGAS PEMBANTUAN

- A. Tugas Pembantuan yang Diterima : Tidak ada
- B. Tugas Pembantuan yang Diberikan : Tidak ada

BAB VI
TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

- A. Kerjasama Antar Daerah : Tidak ada
- B. Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga : Tidak ada
- C. Koordinasi Dengan Instansi Vertikal di Daerah : Tidak ada
- D. Pembinaan Batas Wilayah : Tidak ada
- E. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana : Tidak ada
- F. Pengelolaan Kawasan Khusus : Tidak ada
- G. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum : Tidak ada

BAB VIII

AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH

Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan daerah menginformasikan capaian keberhasilan pemerintah daerah dalam pelaksanaan visi dan misi pemerintah daerah secara terukur, sebagaimana yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Kepala Daerah, Informasi capaian akuntabilitas pemerintah daerah memuat:

A. Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja

Pengukuran pencapaian tujuan sebagaimana ditetapkan dalam Renstra dilakukan melalui pengukuran pencapaian sasaran strategis. Dalam hal ini pengukuran indikator kinerja utama. Untuk menguatkan pencapaian sasaran strategis ini pada tahun 2023 disusun perjanjian kinerja sebagai dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu. Dokumen penetapan kinerja memuat pernyataan dan lampiran formulir yang mencantumkan sasaran strategis, indikator kinerja utama organisasi, beserta target kinerja dan anggaran. Target kinerja menunjukkan komitmen dari pimpinan dan seluruh anggota organisasi untuk mencapai hasil yang diinginkan dari setiap sasaran sesuai indikator kinerja utama yang bersifat *outcome*.

Pada Tahun 2023 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa telah membuat Perjanjian Kinerja yang ditandatangani dan disepakati antara Kepala Dinas dan Gubernur yang meliputi Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur yang mendukung sasaran pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Perubahan (RPJMD-P) Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai kewenangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2023 yang terdiri dari 2 (dua) sasaran strategis dengan menggunakan 8 (delapan) indikator, sebagaimana tercantum dalam Tabel dibawah

Tabel VIII.1

Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	TARGET 2023
1	Meningkatnya Kualitas Tatakelola Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif, Transparan serta Partisipatif	1.1	Prosentase Desa Persiapan yang telah memiliki kode register	100 %
		1.2	Prosentase perubahan status desa minimal berkembang	100 %
		1.3	Prosentase perjanjian kerjasama desa dengan non pemerintah (Bumdes, BKAD, BPMD, Posyandu)	100 %
2	Berkurangnya kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi, sosial, budaya, kelembagaan kemasyarakatan dan masyarakat hukum adat	2.1	Peningkatan Bumdes Aktif	100 %
		2.2	Prosentase peningkatan usaha ekonomi masyarakat (alat TTG yang diserahkan ke desa)	873
		2.3	Posyandu aktif yang melaksanakan pelayanan dasar dalam setahun 12 kali	100 %
		2.4	PKK aktif yang melaksanakan pemenuhan gizi keluarga, pengentasan kemiskinan dan peningkatan pendapatan	100 %
		2.5	Prosentase Lembaga Adat desa yang difasilitasi	100 %

B. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Perjanjian Kinerja

Evaluasi Kinerja dilakukan dengan pengukuran kinerja berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi NTT Tahun 2023. Dokumen Perjanjian Kinerja digunakan sebagai dasar pengukuran kinerja telah mempertimbangkan ketersediaan sumber daya yang dimiliki Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2023, untuk menggambarkan kinerja Perangkat Daerah dengan anggaran yang tersedia. Pengukuran realita kinerja perangkat daerah dilakukan dengan mengumpulkan data kinerja dari masing-masing bidang yang ditunjuk sebagai penanggung jawab penyedia data kinerja berdasarkan sasaran-sasaran yang ingin dicapai, dan dari instansi terkait seperti data IDM Kementerian Desa PDT dan lain sebagainya.

Pengukuran kinerja mencakup seluruh kinerja sasaran strategis berdasarkan dokumen perjanjian kinerja DPMD Tahun 2023 yang ditargetkan untuk dicapai. Indikator kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan ini sekaligus merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) DPMD. Hasil pengukuran kinerja tersebut dituangkan

dalam formulir Pengukuran Kinerja yang mencerminkan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi NTT Tahun 2023.

Berikut hasil capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi NTT.

Tabel VIII.2
Capaian Kinerja Terhadap Target Dalam Perjanjian Kinerja Perubahan
Dinas PMD Provinsi NTT Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	Berkurangnya kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi, sosial, budaya, kelembagaan kemasyarakatan dan masyarakat hukum adat	1. Peningkatan Bumdes Aktif dan Bumdes di Kawasan Pariwisata Estate				
		- Peningkatan Jumlah BUMdes Aktif	Unit	1.500	1.476	98,40
		- Peningkatan Jumlah BUMdes di Kawasan Pariwisata Estate	Unit	100	104	104,00
		2. Prosentase peningkatan usaha ekonomi masyarakat (alat TTG yang diserahkan ke Desa)	Unit	873	675	77,32
		3. Posyandu aktif yang melaksanakan pelayanan dasar dalam setahun 12 Kali	Posyandu	6.652	5.867	88.20
		4. PKK Aktif yang melaksanakan pemenuhan Gizi keluarga, pengentasan kemiskinan dan peningkatan pendapatan	%	100	100	100
		5. Prosentase Lembaga Adat desa yang difasilitasi	%	100	100	100
2	Meningkatnya kualitas tatakelola penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif	1. Prosentase Desa Persiapan yang telah memiliki kode register	%	100	84.09	84.09
		2. Prosentase perubahan status desa minimal berkembang	%	100	51,09	51,09
		3. Prosentase perjanjian kerjasama desa dengan non pemerintah (BUMDes, BKAD, BPMD, Posyandu)	%	100	37,74	37,74
RATA-RATA CAPAIAN						82.32

C. Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan tahun sebelumnya

Capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 jika dibandingkan dengan kondisi tahun sebelumnya digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel VIII.3
Persentase Capaian Kinerja dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dibandingkan Perjanjian Capaian Kinerja Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2022	CAPAIAN 2023
1	2	3	5	6
1	Berkurangnya kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi, sosial, budaya, kelembagaan kemasyarakatan dan masyarakat hukum adat	1. Peningkatan Bumdes Aktif dan Bumdes di Kawasan Pariwisata Estate		
		- Peningkatan Jumlah BUMdes Aktif	127,54	98,40
		- Peningkatan Jumlah BUMdes di Kawasan Pariwisata Estate	105,26	104,00
		2. Prosentase peningkatan usaha ekonomi masyarakat (alat TTG yang diserahkan ke Desa)	81,04	77,32
		3. Posyandu aktif yang melaksanakan pelayanan dasar dalam setahun 12 Kali	98.78	88.20
		4. PKK Aktif yang melaksanakan pemenuhan Gizi keluarga, pengentasan kemiskinan dan peningkatan pendapatan	93,07	100
		5. Prosentase Lembaga Adat desa yang difasilitasi	395.43	100
2	Meningkatnya kualitas tatakelola penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif	1. Prosentase Desa Persiapan yang telah memiliki kode register	100	84.09
		2. Prosentase perubahan status desa minimal berkembang	215.80	51,09
		3. Prosentase perjanjian kerjasama desa dengan non pemerintah (BUMDes, BKAD, BPMD, Posyandu)	210.61	37,74
RATA-RATA CAPAIAN			158,61	82,32

Dari tabel 3.2. di atas tergambar bahwa ada peningkatan capaian kinerja Dinas PMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 berdasarkan Perjanjian Kinerja dibandingkan dengan tahun 2022 yaitu pada tahun 2022 capaian sebesar 158.61 % menurun menjadi sebesar 82,32 %.

Adapun perbandingan capaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur dibandingkan dengan Target RPJMD pada periode 2 tahun terakhir

D. Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target dalam pembangunan jangka menengah.

Capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 jika dibandingkan dengan target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Timur digambarkan dalam berikut:

Tabel VIII.4
Capaian Kinerja Tahun 2023 Dibandingkan Dengan Target Pembangunan Jangka Menengah

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2023			TARGET AKHIR RPJMD (2023)	CAPAIAN TERHADAP TAHUN 2023 (%)	K E T
			TARGET RPJMD	REALISASI	% CAPAIAN			
1	2	3	5	6	7	8	9	10
1	Berkurangnya kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi, sosial, budaya, kelembagaan kemasyarakatan dan masyarakat hukum adat	1. Peningkatan Bumdes Aktif dan Bumdes di Kawasan Pariwisata Estate						
		- Peningkatan Jumlah BUMdes Aktif	1500	1.476	98,40	1500	98.40	
		- Peningkatan Jumlah BUMdes di Kawasan Pariwisata Estate	100	104	104,00	100	104.00	
		2. Prosentase peningkatan usaha ekonomi masyarakat (alat TTG yang diserahkan ke Desa)	873	675	77,32	873	77.32	
		3. Posyandu aktif yang melaksanakan pelayanan dasar dalam setahun 12 Kali	6.652	5.867	88.20	6.652	88.20	
		4. PKK Aktif yang melaksanakan pemenuhan Gizi keluarga, pengentasan kemiskinan dan peningkatan pendapatan	100	100	100	100	100	
		5. Prosentase Lembaga Adat desa yang difasilitasi	100	100	100	100	100	

2	Meningkatnya kualitas tatakelola penyelenggaraa n pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif	1. Prosentase Desa Persiapan yang telah memiliki kode register	100	84.09	84.09	100	84.09	
		2. Prosentase perubahan status desa minimal berkembang	100	51,09	51,09	100	51,09	
		3. Prosentase perjanjian kerjasama desa dengan non pemerintah (BUMDes, BKAD, BPMD, Posyandu)	100	37,74	37,74	100	37,74	
	Rata-Rata Capaian						82.32	

Dari tabel VIII.4. dapat disimpulkan bahwa pada akhir tahun RPJMD terdapat 6 indikator telah mencapai lebih dari 75% target akhir RPJMD 2018-2023, yaitu Jumlah BUMDesa aktif sebanyak 1.476 unit dengan capaian 98.40%, Jumlah BUMDes Pariwisata sebanyak 104 Unit dengan capaian 104.00%, jumlah Alat TTG yang diberikan kepada masyarakat dengan capaian 77.32%, Jumlah Posyandu aktif dengan capaian 88.20%, Jumlah PKK aktif dengan capaian 100%, prosentase lembaga adat desa yang difasilitasi mencapai 100%, prosentase desa persiapan yang telah memiliki kode register dengan capaian 84.09%, Sedangkan 2 indikator masih di bawah 75% yakni prosentase kerjasama desa dengan non pemerintah (Bumdes, BKAD, BPMD, Posyandu) terealisasi capaian sebesar 37.74% dan indikator perubahan status desa berkembang dengan capaian 51.09 %.

E. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dikaitkan dengan hasil (kinerja) yang telah dicapai.

Dalam rangka pencapaian target kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa mempunyai sumber daya sebagai berikut :

1. Sumber Daya Manusia (SDM)

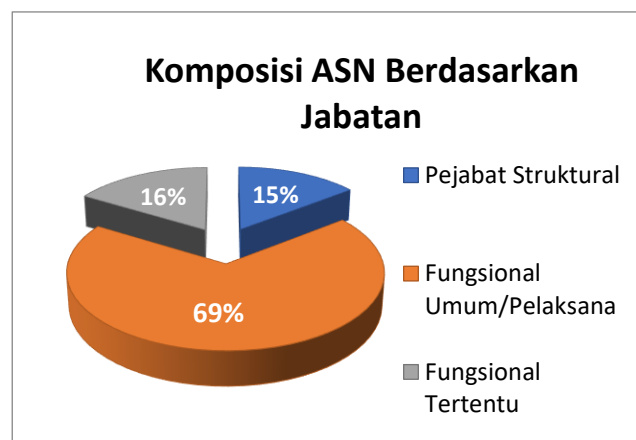
Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi NTT telah didukung dengan sumberdaya manusia sebanyak 55 Pegawai Negeri Sipil, 39 orang Tenaga Honorer Daerah yang dialokasikan sebanyak 22 orang di Sekretariat Dinas PMD Provinsi NTT, 2 orang di Balai TTG Sukabitetek Kabupaten Belu dan 15 orang di Sekretariat Tim Penggerak PKK Provinsi NTT.

Adapun perincian jumlah dan jenis Pegawai diuraikan sebagai berikut :

- Kepala Dinas : 1 orang
- Sekretariat 1 Orang, Sekretariat terdiri atas :
 - (1) Fungsional Perencana, Sub Koordinator Substansi PDE
 - (2) Sub Bagian Keuangan
 - (3) Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
- Bidang-Bidang terdiri atas :
 - (1) Bidang Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat dengan Kabid 1 orang dan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat 1 orang;
 - (2) Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat 1 orang Kabid dan 0 Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat
 - (3) Bidang Pengembangan Potensi Desa dengan Kabid 1 orang dan Kasubid 1 Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat
 - (4) Bidang Bina Pemerintahan Desa dengan Kabid 1 orang dan 2 Fungsional Analis Kebijakan
 - (5) Tenaga Kontrak Daerah berjumlah 39 orang
- 24 orang berada di Kantor Dinas PMD Provinsi NTT yang terbagi menjadi 22 orang berkantor di Dinas PMD Provinsi NTT dan 2 orang berkantor di Balai TTG Sukabitetek Kabupaten Belu
- 15 orang tenaga kontrak di sekretariat PKK

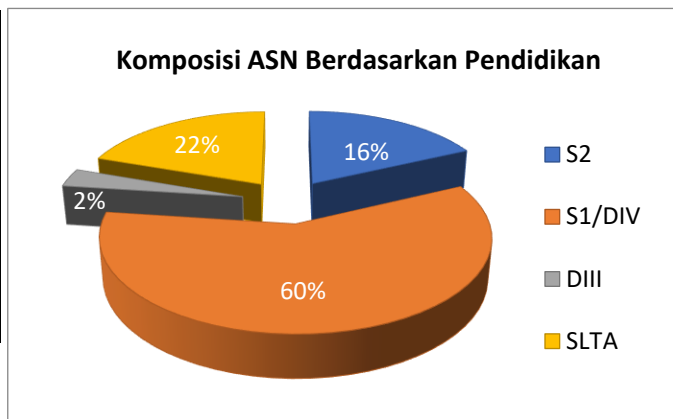
Gambar 1.2
Komposisi ASN Berdasarkan Jabatan

JABATAN	JUMLAH	%
Pejabat Struktural	8	14.55
- Eselon II	1	1.82
- Eselon III	5	9.09
- Eselon IV	2	3.64
Fungsional Tertentu	9	16.36
Fungsional Umum	38	69.09
Jumlah	55	100



Gambar 1.3
Komposisi ASN Berdasarkan Strata Pendidikan

PENDIDIKAN	JUMLAH	%
S2	9	16.36
S1/DIV	33	60.00
DIII	1	1.82
SLTA	12	21.82
JUMLAH	55	100



2. Sarana Prasarana

Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur didukung dengan Sarana Prasarana Kantor yang cukup memadai. Jumlah aset sampai dengan akhir tahun 2023 adalah senilai Rp. 10.104.562.950,43 dengan 6 jenis bidang barang yaitu Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan/Irigasi/Jaringan dan Asset Tetap Lainnya

a. Berdasarkan aset yang ada, dalam kondisi baik dan dapat dimanfaatkan untuk mendukung kinerja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur dan perlu penggantian untuk aset yang rusak berat guna memenuhi ketersediaan aset yang layak dan sesuai. Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat selama 5 (lima) Tahun kedepan, perlu dilakukan pemeliharaan dan perbaikan maupun pembangunan serta pengadaan sarana prasarana perkantoran antara lain pemeliharaan dan renovasi gedung/ruangan, pembangunan gedung untuk gudang arsip, revitalisasi Balai Teknologi Tepat Guna Noelbaki, pengadaan barang inventaris Kantor/Rumah Tangga, Alat Angkutan / Kendaraan dinas, Alat-alat Studio/Komunikasi. Selengkapnya data Sumber Daya Sarana Prasarana yang merupakan Aset pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur.

3. Pembiayaan

Alokasi anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun Anggaran 2023 sebesar, Rp. **9,051,591,780,-** terdiri dari Belanja Operasional

Rp. **9,051,591,780,-** dengan realisasi Belanja Operasional Rp. **7,401,465,357,-**,
(81,77%),.

Rincian Alokasi Anggaran dan Realisasi per 31 Desember 2022

No.	Uraian Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
BELANJA DAERAH				
I.	Belanja Operasi	9,051,591,780,-	7,401,465,357,-	81.77
	Belanja Pegawai	5,477,863,000,-	4,868,022,947,-	88.87
	Belanja Barang dan Jasa	3,573,728,780,-	2,533,442,410,-	70.89
II.	Belanja Modal	0.-	0.-	0
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0.-	0.-	0
Jumlah Belanja		9,051,591,780,-	7,401,465,357,-	81.77

F. Analisis Program dan Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Target

Analisis terhadap sasaran program dan masing-masing indikator kinerja program yang disajikan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2023 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai berikut:

Sasaran Program 1
Berkurangnya kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi, sosial, budaya, kelembagaan kemasyarakatan dan masyarakat hukum adat

Sasaran program berkurangnya kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi, sosial, budaya, kelembagaan kemasyarakatan dan masyarakat hukum adat dimaksudkan guna mewujudkan visi dan misi Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui kegiatan yang mendorong peningkatan ekonomi masyarakat di desa melalui pemberdayaan BUMDes dan pemberdayaan ekonomi masyarakat lainnya, serta peningkatan Teknologi Tepat Guna untuk meningkatkan pengelolaan potensi desa di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat.

Capaian sasaran program dicapai melalui 3 kegiatan dengan 5 indikator kinerja yang terkait langsung dengan kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan program prioritas Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan ringkasan target, realisasi dan capaian sebagai berikut:

Tabel VIII.5
Ringkasan Target, Realisasi dan Capaian IKU
Sasaran Program 1

Program/Sasaran	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat/ Berkurangnya kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi, sosial, budaya, kelembagaan kemasyarakatan dan masyarakat hukum adat	Meningkatnya Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat di Bidang Ekonomi, Sosial dan Adat (BUMDes, Koperasi Tani, Gapoktan, Kelompok Tani, PKK, Karang Taruna, Pemuda Tani, Posyandu, Posyantek dan Wanita Tani) menuju <i>BUMDes Aktif total 1500 unit di Tahun 2023</i>	Unit	1.500	1.476	98.40

Tabel VIII.6
Dengan capaian sasaran kegiatan disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan (Output)				
		Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	2	3	4	5	6	7
1	Terfasilitasinya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	1.1 Penyusunan Buku Transformasi Ekonomi Desa	Dokumen	1	0	0
2	Terfasilitasinya Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	2.1 Pengembangan Inovasi Peralatan TTG	Unit	10	8	80
3	Terfasilitasinya Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggar	3.1 Lomba-Lomba PKK (Administrasi, PAAR, UP2K, HATINYA PKK dan	Kab/Kota	22	22	100

	aan Gerakan Pemberdayaa n Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Kampanye Kesehatan) Tingkat Pro. NTT				
		3.2 Rapat Koordinasi Tim Penggerak PKK Tingkat Provinsi NTT dan Tingkat Nasional	Kegi a tan	2	2	100
		3.3 Fasilitasi Kegiatan Bambu	Kab	7	0	0

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa dari 5 Indikator Kegiatan yang mendukung capaian sasaran program “Berkurangnya kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi, sosial, budaya, kelembagaan kemasyarakatan dan masyarakat hukum adat” ada 2 (dua) yang tidak tercapai yaitu Kegiatan Penyusunan Buku Transformasi Ekonomi Desa dan Fasilitasi Kegiatan Bambu dikarenakan keterbatasan anggaran yang mengakibatkan kegiatan tidak dilaksanakan..

Sasaran Kegiatan 1

Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan

Penyusunan Buku Transformasi Ekonomi Desa

Sasaran kegiatan ini tidak dilaksanakan karena keterbatasan anggaran.

Sasaran Kegiatan 2

Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna

Pengembangan Inovasi Peralatan TTG

➤ Kegiatan yang dilaksanakan

Berdasarkan DPA perakitan/pembuatan alat pengering daun kelor dan alat penepung daun kelor berjumlah 16 buah yaitu 8 unit alat pengering daun kelor dan 8 unit alat penepung daun kelor. Namun, karena kondisi keuangan yang direalisasi hanya untuk memproduksi 8 unit alat pengering daun kelor. Perakitan alat pengering daun kelor dilaksanakan dalam semester I sebanyak 4 unit dan semester II sebanyak 4 unit.

Pengembangan peralatan TTG, telah direncanakan tahapannya yaitu:

- Persiapan pelaksanaan, pembuatan TOR, RAB, dan desain alat
- Pengadaan bahan dan peralatan pendukung.
- Perakitan Mesin Pengering daun kelor dan mesin penepung daun kelor.
- Uji coba alat yang selesai di rakit.
- Pelaporan pelaksanaan.

➤ Waktu dan Tempat

a. Waktu

Semester I

Waktu pengerjaan untuk menghasilkan 4 unit alat pengering daun kelor adalah selama 13 Hari Kerja dari tanggal 27 Februari s.d 10 Maret 2023 sesuai dengan Surat Tugas Nomor: 094/03/DPMD 4.1/2.2023 Tanggal 24 Februari 2023 dan pada tanggal 20,21 dan 24 Maret sesuai Surat Tugas Nomor: 094/84/DPMD 4.1/3.2023 Tanggal: 16 Maret 2023.

Semester II

Waktu pengerjaan untuk menghasilkan 4 unit alat pengering daun kelor adalah selama 22 Hari Kerja sesuai dengan Surat Tugas Nomor: 094/19/DPMD 4.1/2.2023 Tanggal 17 November 2023, Surat Tugas Nomor: 094/20/DPMD 4.1/3.2023 Tanggal: 4 Desember 2023 dan Surat Tugas Nomor: 094/374/DPMD 4.1/12.2023.

b. Tempat

Tempat pelaksanaan kegiatan adalah Puspem TTG Noelbaki.

➤ Hasil yang diperoleh

Selama Tahun 2023, dari perencanaan pembuatan 16 unit alat pengering dan pengepung daun kelor, setelah perubahan, telah dibuat sebanyak 8 unit alat pengering daun kelor.

Dari hasil promosi dan pengujian bersama pihak pengusaha produk daun kelor, alat pengering daun kelor yang diproduksi di PUSPEM TTG Noelbaki cukup diminati karena telah memenuhi standar sesuai ketentuan dan kebutuhan pasar. Dari 8 Unit alat pengering daun kelor yang sudah diproduksi, terdapat 2 unit yang terjual sebagai salah satu sumber PAD sehingga 4 unit alat pengering daun kelor di TTG Noelbaki saat ini.

Sasaran Kegiatan 3

Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga

A. Lomba-Lomba PKK (Administrasi, PAAR, UP2K, HATINYA PKK dan Kampanye Kesehatan) Tingkat Pro. NTT

Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud dari pelaksanaan Lomba 10 Program Pokok PKK Tingkat Provinsi NTT adalah untuk menilai TP-PKK desa/kelurahan terbaik dari setiap

Kabupaten/Kota se-Provinsi NTT yang meliputi 5 (lima) kategori lomba yaitu Lomba TP-PKK Desa/kelurahan pelaksanaan terbaik yakni (1) Lomba Tertib Administrasi PKK, (2) Lomba Pola Asuh Anak dan Remaja dengan Penuh Cinta dan Kasih Sayang dalam Keluarga, (3) Lomba Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) PKK, (4) Lomba Amalkan dan Kukuhkan Halaman Asri Teratur Indah dan Nyaman (AKU HATINYA) PKK, dan (5) Lomba Penyuluhan Kesehatan (video pendek).

2. Tujuan

Tujuan pelaksanaan Lomba 10 Program Pokok PKK Tingkat Provinsi NTT yakni:

- Memotivasi, mengevaluasi dan menilai TP PKK secara berjenjang dalam melaksanakan 10 Program Pokok PKK;
- Mengetahui capaian kinerja TP PKK selama kurun waktu 1 (satu) tahun dalam mewujudkan peningkatan kualitas hidup masyarakat hingga tingkat dasawisma; dan
- Sarana apresiasi dari Pemerintah Provinsi berupa penghargaan kepada TP PKK di masing-masing wilayah atas prestasi yang telah dicapai dalam memajukan, memandirikan dan mensejahterakan masyarakat.

Waktu dan Tempat Pelaksanaan

1. Waktu

Pelaksanaan Lomba 10 Program Pokok PKK Tingkat Provinsi NTT dimulai sejak bulan Januari sampai dengan bulan Mei 2023.

2. Tempat

Lomba 10 Program Pokok PKK Tingkat Provinsi NTT bertempat di Provinsi NTT dengan lokasi penilaian di seluruh Kabupaten/Kota se Nusa Tenggara Timur.

Tahapan dan Waktu Pelaksanaan Lomba

Peserta Lomba

Peserta pada lomba dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Peserta Lomba 10 Program Pokok PKK tingkat Kecamatan adalah desa/kelurahan dalam satu wilayah Kecamatan;

2. Peserta Lomba 10 Program Pokok PKK tingkat Kabupaten/Kota adalah desa dan Kelurahan yang menjadi Juara I (satu) tingkat Kecamatan yang berada dalam satu wilayah Kabupaten/Kota;
3. Peserta Lomba 10 Program Pokok PKK tingkat Provinsi adalah desa, kelurahan yang menjadi Juara I (satu) tingkat Kabupaten/Kota yang berada dalam satu wilayah Provinsi.

Tahap Pelaksanaan Lomba

Lomba 10 Program Pokok PKK dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat Kecamatan, Kabupaten/Kota hingga Provinsi. Masing-masing jenjang tersebut melaksanakan tahapan penilaian sebagai berikut:

1. Penilaian Administrasi;
2. Klarifikasi Lapangan atau Uji Petik; dan
3. Penetapan Juara.

Tahapan pada bagian ini berlaku pada setiap tingkatan dan disertai dengan dokumentasi berupa laporan kegiatan yang berisi foto dan narasi sebagai bukti dan arsip kegiatan.

Skoring Penilaian Lomba

Penilaian administrasi dan keadaan yang terdapat di lokasi atau lapangan dilaksanakan oleh panitia berdasarkan skoring nilai dari masing-masing Pokja dan Sekretariat kepada peserta berdasarkan instrumen penilaian.

Berita Acara Penilaian Lomba

Pada tahapan ini, Tim Penilai Lomba 10 Program Pokok PKK menetapkan desa/kelurahan yang masuk ke tahap berikutnya berdasarkan skoring penilaian yang dituangkan dalam Berita Acara Penilaian Lomba dan ditandatangani oleh Tim Penilai. Penilaian Administrasi yang lolos ke tahap berikutnya akan ditetapkan sebagai Juara Tingkat Kecamatan dan seterusnya hingga mendapatkan Juara Tingkat Kabupaten/Kota.

Klarifikasi Lapangan atau Uji Petik

Klarifikasi lapangan dapat dilakukan untuk menilai kesesuaian data dan informasi berdasarkan dokumen yang diunggah pada *link google drive* yang diberikan dengan kondisi riil yang ada di lapangan. Pada tahap ini, jumlah 7 Desa/kelurahan /Kecamatan yang diklarifikasi oleh tim penilai adalah yang telah

menjadi juara di tingkat Kabupaten/Kota berdasarkan berita acara penetapan juara lomba. Kegiatan klarifikasi lapangan ini sesuai dengan protocol kesehatan *covid-19* dengan ketentuan:

1. Tim Penilai Klarifikasi Lapangan dalam melakukan penilaian secara langsung menuju lokasi Desa/kelurahan /Kecamatan;
2. Hasil Klarifikasi lapangan adalah berbentuk laporan yang dilengkapi dokumentasi dengan *audio/visual* dan bahan lainnya.

Penetapan dan Penghargaan Juara Lomba 10 Program Pokok PKK

Penetapan dan Penghargaan Juara Lomba 10 Program Pokok PKK di Tingkat Provinsi NTT dilaksanakan sebagai berikut:

1. Penetapan Juara

Penetapan juara Lomba 10 Program Pokok PKK Tingkat Provinsi ditetapkan berdasarkan hasil rekapitulasi penilaian di tingkat Provinsi NTT.

2. Penghargaan Juara

Penghargaan atau hadiah adalah sebagai bentuk apresiasi terhadap Lomba 10 Program Pokok PKK Tingkat Provinsi. Penghargaan atau hadiah pada masing masing jenis lomba akan diberikan berupa piagam dan uang yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan dana APBD TA 2023.

Hadiah Pemenang Lomba

Pelaksanaan Lomba 10 Program Pokok PKK Tingkat Provinsi NTT Tahun 2023 memiliki 6 (enam) pemenang lomba untuk 5 kategori lomba sebagai berikut:

No	Kategori Juara	Hadiah
1	Juara I	Rp. 4.500.000
2	Juara II	Rp. 3.500.000
3	Juara III	Rp. 2.500.000
4	Juara Harapan I	Rp. 2.000.000
5	Juara Harapan II	Rp. 1.500.000
6	Juara Harapan III	Rp. 1.000.000

B. Rapat Koordinasi Tim Penggerak PKK Tingkat Provinsi NTT dan Tingkat Nasional

TEMPAT DAN WAKTU

1. Tempat

Aula Rumah Jabatan Gubernur NTT dan Pulau Semau.

2. Waktu

Tanggal 09 s.d 10 Juni 2023.

PESERTA

Peserta Rakor PKK Provinsi NTT direncanakan, terdiri atas: Unsur TP PKK Provinsi NTT (Peserta dan Panitia) : 46 orang

1. Unsur TP PKK Kabupaten/Kota 8 orang tiap

Kabupaten/Kota (Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris/Bendahara, Ketua Pokja I, Ketua Pokja II, Ketua Pokja III, Ketua Pokja IV) : 176 orang

3. Unsur TP PKK Desa/Kelurahan yang masuk dalam juara Lomba 10 Program Pokok PKK : 27 orang

Sampai dengan berakhirnya kegiatan Rakor, total yang hadir 267 orang

PROSES PELAKSANAAN

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Tim Penggerak PKK Tingkat Provinsi NTT dilaksanakan dengan proses sebagai berikut:

1. Pembukaan.

2. Penyerahan Piagam dan Plakat kepada Perwakilan Perempuan Berjasa dan Berprestasi pada 22 Kabupaten/Kota se Provinsi NTT oleh Organisasi Aksi Soladiritas Era Kabinet Indonesia Maju (OASE).

3. Penyerahan Hasil Lomba 10 Program Pokok Tim Penggerak PKK Tingkat Provinsi NTT Tahun 2023.

4. Rangkaian materi dengan Topik “Penguatan Peran PKK dan Pemberdayaan Potensi Lokal” yang disampaikan secara paralel oleh 5 (lima) orang Narasumber, yaitu:

a. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi NTT

b. Kepala Perwakilan BKKBN NTT.

c. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT

d. Kepala Dinas PMD.

e. Dapur Kelor

5. Diskusi Kelompok:

Dibagi dalam 5 (lima) kelompok:

- Kelompok I, membahas sinkronisasi Hasil Rakor TP PKK Pusat dengan daerah terkait Bidang Sekretaris TP PKK, dan penyampaian informasi Program Kerja Sekretaris Provinsi NTT Tahun 2023.
- Kelompok II, membahas sinkronisasi Hasil Rakor TP PKK Pusat dengan daerah terkait dengan tugas Bidang Pokja I, dan penyampaian informasi Program Kerja Pokja I Tahun 2023.
- Kelompok III, membahas sinkronisasi Hasil Rakor TP PKK Pusat dengan daerah terkait tugas Bidang Pokja II TP PKK, dan penyampaian informasi Program Kerja Pokja II Tahun 2023.
- Kelompok IV, membahas sinkronisasi Hasil Rakor TP PKK Pusat dengan daerah terkait tugas Bidang Pokja III TP PKK, dan penyampaian informasi Program Kerja Pokja III Tahun 2023.
- Kelompok V, membahas sinkronisasi Hasil Rakor TP PKK Pusat dengan daerah terkait tugas Bidang Pokja IV TP PKK, dan penyampaian informasi Program Kerja Pokja IV Tahun 2023
- Perumusan hasil Rakor Tim Penggerak PKK Tingkat Provinsi NTT Tahun 2023 oleh masing-masing Pokja dan Para Sekretaris

HASIL YANG DIHARAPKAN

1. Adanya sinkronisasi Kesimpulan dan Rekomendasi Rapat Koordinasi Tim Penggerak PKK Pusat Tahun 2022 dengan Kesimpulan dan Rekomendasi Rapat Koordinasi Tim Penggerak PKK Tingkat Provinsi NTT Tahun 2023.
2. Tim Penggerak PKK Kabupaten/Kota se-Provinsi NTT memperoleh informasi tentang:
 - a) Hasil Rakernas IX Tim Penggerak PKK Tingkat Pusat Tahun 2021
 - b) Hasil Rakornas Tim Penggerak PKK Tingkat Nasional Tahun 2022
 - c) Kebijakan TP PKK Provinsi NTT Tahun 2020.
 - d) Integrasi Perencanaan Program dan Penganggaran Gerakan PKK dalam
 - e) Sistem Perencanaan Pembangunan Desa dan Pembangunan Daerah
 - f) Pengembangan Kampung KB.
 - g) Stunting dan Upaya Pencegahan Stunting di Tingkat Desa/Kelurahan.

c. Fasilitas Kegiatan Bambu

Sasaran kegiatan ini tidak dilaksanakan karena keterbatasan anggaran.

Realisasi output Tahun 2023 sebanyak 1 Laporan atau mencapai 100 % dari target sebanyak 1 Laporan.

Dari sisi penggunaan dana IKK ini telah efisien. Kondisi ini terlihat dari capaian indikator kinerja sebesar 100 % lebih tinggi dibandingkan dengan capaian dana sebesar 55.25 %

Sasaran Program 2

Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pelayanan masyarakat

Sasaran program meningkatnya kualitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pelayanan masyarakat dimaksudkan guna mewujudkan misi dan visi Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui kegiatan yang menunjang pelaksanaan pemerintahan desa yang berkualitas di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Capaian sasaran program dicapai melalui 2 sasaran program, 2 kegiatan dengan 4 indikator kinerja output yang terkait langsung dengan kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan program prioritas Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan ringkasan target, realisasi dan capaian sebagaimana disajikan pada Tabel berikut:

Tabel VIII.7

Ringkasan Target, Realisasi dan Capaian IKU
Sasaran Program Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pelayanan masyarakat

Program/Sasaran	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)		(7)	(8)
Program Administrasi Pemerintahan Desa/ Meningkatnya kualitas tatakelola penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif	Meningkatnya status desa minimal Desa Berkembang sebanyak 132 desa sampai dengan tahun 2023	%	100	51.09	51.09

Dengan capaian sasaran kegiatan disajikan dalam tabel VIII.8 berikut :

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan (Output)					
		Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Fasilitasi Kabupaten/ Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa	1.1	Penataan Desa	Dokumen	1	1	25.21
2	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	2.1	Kegiatan Lomba Desa/Kelurahan	Dokumen	1	1	15.89
3	Pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa	3.1	Fasilitasi Program P3PD	Dokumen	1	0	0
		3.2	Rapat Koordinasi Dinas PMD	Laporan	1	0	0

Dari Tabel menunjukkan bahwa dari 3 Indikator Kegiatan yang mendukung capaian sasaran program “Terciptanya keamanan, iklim investasi dan usaha yang berkualitas” terdapat 2 indikator kegiatan yang tidak tercapai yakni indikator kegiatan Fasilitasi Program P3PD dan Rapat Koordinasi Dinas PMD, karena kondisi keuangan sehingga kegiatan tersebut tidak dilaksanakan sedangkan untuk kegiatan Penataan Desa dan Lomba Desa/Kelurahan.

Realisasi output Tahun 2023 penggunaan dana IKK ini belum efisien. Kondisi ini terlihat dari capaian indikator kinerja sebesar 51.09 % lebih tinggi dibandingkan dengan capaian dana sebesar 25.21 %

Sasaran Kegiatan 1	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali kota yang Mengatur Desa
---------------------------	--

Penataan Desa

Terkait dengan pelaksanaan fungsi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Provinsi sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka setiap rancangan Perda tentang Desa dan Kelurahan yang diusulkan oleh Kabupaten/Kota, sebelum diassistensi ke Biro Hukum Setda Provinsi NTT, terlebih dahulu dikonsultasi substansi materinya ke Dinas PMD sebagai dinas teknis, sesuai Surat Gubernur NTT kepada Bupati/Walikota se Provinsi NTT Nomor : BU.140/08/PMD/2022 tanggal 9 Agustus 2022.

Pelaksanaan fungsi tersebut, dapat disampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten yang menyampaikan Ranperda terkait dengan Desa sepanjang Tahun 2023 perlu dibahas bersama Dinas PMD Provinsi Nusa Tenggara Timur, tidak semuanya dibahas karena disesuaikan dengan peraturan menteri yang telah ditetapkan. Setiap Ranperda yang telah dibahas bersama, dibuatkan surat hasil penyerasian/konsultasi, selanjutnya disampaikan kepada Pemda setempat untuk penyerasian substansi materi yang telah diajukan.

Penyerasian substansi Rancangan Peraturan Bupati Tentang Kewenangan Desa dilaksanakan pada bulan September, Oktober dan Nopember. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi NTT dengan anggaran yang ada dalam DPA SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi NTT untuk kegiatan Fasilitasi Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa. Penyerasian tersebut dilakukan bersama Pemerintah Kabupaten Manggarai dan Manggarai Timur untuk melakukan penyerasian dan berdiskusi bersama tim di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kabupaten yang berkaitan dengan isi materi Rancangan Peraturan Daerah yang membutuhkan penyempurnaan sesuai dengan tata penulisan Rancangan Peraturan Daerah yang benar.

Kegiatan penyerasian Rancangan Peraturan Daerah ini dilakukan agar terjadi penyelarasan, penyesuaian yang berkaitan dengan isi Rancangan Peraturan daerah yang telah dibuat oleh Kabupaten. Hasilnya, kemudian dikonsultasikan dengan Biro Hukum Provinsi NTT untuk diperbaiki atau disempurnakan berbagai kekurangan sesuai dengan tata cara penyusunan yang benar.

Adapun Tahapan Penyusunan Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa adalah sebagai berikut :

1. Kabupaten menyusun draf Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa.
2. Kabupaten dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten melakukan konsultasi ke Provinsi pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi berkaitan dengan penyempurnaan isi Rancangan Peraturan Daerah sesuai peraturan yang berlaku.
3. Setelah dilakukan penyerasian dengan Provinsi maka Provinsi akan mengeluarkan Berita Acara Hasil Penyerasian Ranperda tentang Pembentukan Desa sehingga kabupaten segera melakukan perbaikan terhadap beberapa hal yang perlu disesuaikan dan disempurnakan.

4. Setelah itu kabupaten melakukan konsultasi Ranperda tentang Pembentukan Desa ke Biro Hukum dan Kementerian Dalam Negeri RI, c.q. Dirjen Bina Pemerintahan Desa untuk mendapatkan beberapa hal yang perlu di sempurnakan.
5. Gubernur Nusa Tenggara Timur menerbitkan rekomendasi hasil koordinasi Ranperda tentang Pembentukan Desa sebagai dasar bagi Bupati untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa

Jumlah desa defenitif di wilayah provinsi Nusa Tenggara Timur sampai bulan Desember 2023 adalah sebanyak 3.137 desa, dapat dilihat pada Tabel di bawah ini :

Tabel VIII.9
Rekapitulasi Jumlah Desa Dan Kelurahan di NTT
Tahun 2023

No	Kabupaten	Kecamatan	Desa	Kelurahan	Jumlah Desa/ Kelurahan
1	Kupang	24	160	17	177
2	TTS	32	266	12	278
3	TTU	24	182	11	193
4	Belu	12	69	12	81
5	Alor	18	158	17	175
6	Flores Timur	19	229	21	250
7	Sikka	21	181	13	194
8	Ende	21	255	23	278
9	Ngada	12	190	16	206
10	Manggarai	12	145	26	171
11	Sumba Timur	22	140	16	156
12	Sumba Barat	6	63	11	74
13	Lembata	9	144	7	151
14	Rote Ndao	11	112	7	119
15	Manggarai Barat	12	164	5	169
16	Nagekeo	7	97	16	113
17	Sumba Tengah	6	65	0	65
18	Sumba Barat Daya	11	173	2	175
19	Manggarai Timur	12	159	17	176
20	Sabu Raijua	6	58	5	63
21	Malaka	12	127	0	127
22	Kota Kupang	6	0	51	51
T o t a l		315	3,137	305	3,442

Sasaran Kegiatan 2**Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan****Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan**

Kegiatan Fasilitasi Evaluasi perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan dalam tahun anggaran 2023 telah dilaksanakan sesuai petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, dan telah menetapkan kategori juara berdasarkan Surat keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : BU. 100.3.3.1/07/DPMD/2023, tanggal 3 Juli 2023, sebagai berikut :

NO	NAMA DESA, KECAMATAN & KABUPATEN	KATEGORI JUARA LOMBA DESA
1	Desa Blangmerang, Kecamatan Pantar Barat, Kabupaten Alor	Juara I
2	Desa bali Loku, Kecamatan Wanu Kaka, Kabupaten Sumba Barat	Juara II
3	Desa Siomeda, Kecamatan Rote tengah, Kabupaten Rote Tengah	Juara III

Sasaran Kegiatan 3**Pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa****Fasilitasi Program P3PD dan Rapat Koordinasi Dinas PMD**

Kegiatan Fasilitasi Program P3PD dan Rapat Koordinasi Dinas PMD, karena kondisi keuangan sehingga kegiatan tersebut tidak dilaksanakan di tahun 2023.



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Jalan Basuki Rahmat Nomor 1 Gedung B Lantai 3 Telepon (0380) 820532
KUPANG

Data Lembaga Adat Desa Se-NTT
Tahun 2023

No	Kabupaten	Jml	Nama/Jenis Lembaga Adat	Keterangan
1	Kupang	-	-	Sedang berproses
2	Timur Tengah Selatan	-	-	Sedang berproses
3	Timur Tengah Utara	-	-	Sedang berproses
4	Belu	-	-	Sedang berproses
5	Malaka	2	Loro (Pemimpin), Kenaian (Wilayah)	Rancangan PerDa tersebar di 127 Desa
6	Rote Ndao	-	-	Sedang berproses
7	Sabu Raijua	-	-	Sedang berproses
8	Alor	12	Nuh Atinang, Pura Ternate Buaya, Abui Klon Hamap dan Masia, Rumpun Abui Lambur, Abui Welai, Abui Mataru, Kulligang, Kolana, Batulolong, Lera gereng, Biaang wala, Baranusa	Tersebar di 158 desa, Perda no 4 tahun 2018
9	Lembata	-	-	Sedang berproses
10	Flores Timur	2	Lembaga Adat Nawokote, Masyarakat Hukum Adat Tana Ai.	Perbup no 65 tahun 2020
11	Sikka	1	Kelembagaan Adat	Desa Nita (Lembaga Adat yang dibentuk di Desa melalui Perdes).
12	Ende	167	Mosalaki	Tersebar di 167 Desa. Perda no 2 Tahun 2017
13	Nagekeo	18		Perbup no 31 tahun 2021
14	Ngada			Draf Perbup
15	Manggrai Timur	49	Gendang	Tersebar di 16 Desa.
16	Manggarai	-	-	Sedang berproses
17	Manggarai Barat	-	-	Sedang berproses
18	Sumba Barat Daya	-	-	Sedang berproses
19	Sumba Barat	2	-	Di Kec. Loli
20	Sumba Tengah	63	-	Perda no 12 tahun 2020
21	Sumba Timur	32	Kelembagaan Adat	Tersebar di 32 Desa di 3 Kecamatan
	Jumlah	348	53 jenis/nama	

Kupang, Januari 2024

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Viktorius Manek. S.Sos. M.Si

Pembina Utama Madya
NIP.196910081995031006

PARAF HIERARKI	
Sekretaris	
Sub Koordinator PDE	
Pelaksana	



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Jalan Basuki Rahmat Nomor 1 Gedung B Lantai 3 Telepon (0380) 820532
K U P A N G

REKAPITULASI DATA BUMDES BERSAMA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2023

No	Kabupaten	Kecamatan	Desa	Bumdes Bersama
1	Kupang	24	160	13
2	TTS	32	266	22
3	TTU	24	182	4
4	Belu	12	69	3
5	Alor	18	158	15
6	Flores Timur	19	229	6
7	Sikka	21	181	21
8	Ende	21	255	16
9	Ngada	12	190	75
10	Manggarai	12	145	11
11	Sumba Timur	22	140	11
12	Sumba Barat	6	63	3
13	Lembata	9	144	4
14	Rote Ndao	11	112	35
15	Manggarai Barat	12	164	20
16	Nagekeo	7	97	42
17	Sumba Tengah	6	65	4
18	Sumba Barat Daya	11	173	6
19	Manggarai Timur	12	159	8
20	Sabu Raijua	6	58	7
21	Malaka	12	127	4
22	Kota Kupang	6	0	0
Total		315	3.137	330

Sumber data : IDM Kemendagri

Kupang, Januari 2024

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Viktorius Manek, S.Sos. M.Si
Pembina Utama Madya
NIP.196910081995031006

PARAF HIERARKI	
Sekretaris	
Sub Koordinator PDE	
Pelaksana	



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Jalan Basuki Rahmat Nomor 1 Gedung B Lantai 3 Telepon (0380) 820532
K U P A N G

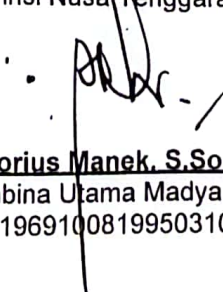
REKAPITULASI DATA BUMDES BERSAMA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2022 - 2023




No	Kabupaten	Kecamatan	Desa	Bumdes Bersama		Data 2022 -2023
				2022	2023	
1	Kupang	24	160	7	13	6
2	TTS	32	266	12	22	10
3	TTU	24	182	5	4	-1
4	Belu	12	69	3	3	0
5	Alor	18	158	18	15	-3
6	Flores Timur	19	229	9	6	-3
7	Sikka	21	181	11	21	10
8	Ende	21	255	22	16	-6
9	Ngada	12	190	69	75	6
10	Manggarai	12	145	8	11	3
11	Sumba Timur	22	140	16	11	-5
12	Sumba Barat	6	63	4	3	-1
13	Lembata	9	144	4	4	0
14	Rote Ndao	11	112	7	35	28
15	Manggarai Barat	12	164	21	20	-1
16	Nagekeo	7	97	35	42	7
17	Sumba Tengah	6	65	2	4	2
18	Sumba Barat Daya	11	173	9	6	-3
19	Manggarai Timur	12	159	9	8	-1
20	Sabu Raijua	6	58	6	7	1
21	Malaka	12	127	37	4	-33
22	Kota Kupang	6	0	0	0	0
Total		315	3.137	314	330	16

Sumber data : IDM Kemendagri

Kupang, Januari 2024

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Provinsi Nusa Tenggara Timur


Viktorius Manek, S.Sos. M.Si
Pembina Utama Madya
NIP.196910081995031006

PARAF HIERARKI	
Sekretaris	
Sub Koordinator PDE	
Pelaksana	



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Jalan Basuki Rahmat Nomor 1 Gedung B Lantai 3 Telepon (0380) 820532
K U P A N G

REKAPAN LEMBAGA MASYARAKAT DAN LEMBAGA ADAT
TAHUN 2023

NO	KABUPATEN	JUMLAH KECAMATAN	JUMLAH DESA	PKK AKTIF	POSYANDU AKTIF	LEMBAGA ADAT	JUMLAH
1	KOTA KUPANG	6	0	0	247	-	247
2	KUPANG	24	160	320	642	-	962
3	TIMOR TENGAH SELATAN	32	266	532	436	-	968
4	TIMOR TENGAH UTARA	24	182	320	490	-	810
5	BELU	12	69	137	343	-	480
6	MALAKA	12	127	254	393	2	649
7	ROTE NDAO	11	112	214	57	-	271
8	SABU RAIJUA	6	58	116	156	-	272
9	ALOR	18	158	316	124	12	452
10	LEMBATA	9	144	288	232	-	520
11	FLORES TIMUR	19	229	458	455	2	915
12	SIKKA	21	181	294	611	1	906
13	ENDE	21	255	510	252	167	929
14	NAGEKEO	7	97	194	143	18	355
15	NGADA	12	190	270	196	-	466
16	MANGGARAI TIMUR	12	159	318	169	49	536
17	MANGGARAI	12	145	290	278	-	568
18	MANGGARAI BARAT	12	164	328	261	-	589
19	SUMBA TIMUR	22	140	280	243	32	555
20	SUMBA TENGAH	6	65	130	40	63	233
21	SUMBA BARAT	6	63	126	50	2	178
22	SUMBA BARAT DAYA	11	173	346	49	-	395
TOTAL		315	3.137	6.041	5.867	348	12.256

Sumber data : IDM Kemendagri.

Kupang, Januari 2024

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Viktorius Manek, S.Sos. M.Si

Pembina Utama Madya

NIP.196910081995031006

PARAF HIERARKI	
Sekertaris	
Sub Koordinator PDE	
Pelaksana	



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Jalan Basuki Rahmat Nomor 1 Gedung B Lantai 3 Telepon (0380) 820532
K U P A N G

DATA PENINGKATAN DESA YANG MELAKSANAKAN KEGIATAN
EKONOMI PRODUKTIF DAN PEMBERDAYAAN
TAHUN 2023

NO	KABUPATEN	JUMLAH KECAMATAN	JUMLAH DESA	PKK AKTIF		PENINGKATAN DESA (2022- 2023)
				2022	2023	
1	Kota Kupang	6	-	-	-	0
2	Kupang	24	160	86	320	234
3	Timor Tengah Selatan	32	266	167	532	365
4	Timor Tengah Utara	24	160	119	320	201
5	Belu	12	69	63	137	74
6	Malaka	12	127	110	254	144
7	Rote Ndao	10	112	65	214	149
8	Sabu Raijua	6	58	29	116	87
9	Alor	17	158	77	316	239
10	Lembata	9	144	127	288	161
11	Flores Timur	19	229	220	458	238
12	Sikka	21	147	117	294	177
13	Ende	21	255	187	510	323
14	Nagekeo	7	97	78	194	116
15	Ngada	12	135	105	270	165
16	Manggarai Timur	9	159	104	318	214
17	Manggarai	12	145	121	290	169
18	Manggarai Barat	12	164	117	328	211
19	Sumba Timur	22	140	101	280	179
20	Sumba Tengah	5	65	59	130	71
21	Sumba Barat	6	63	51	126	75
22	Sumba Barat Daya	11	173	150	346	196
TOTAL		309	3.026	2.253	6.041	3.788

Sumber data : IDM Kemendagri

Kupang, Januari 2024

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Viktorius Manek, S.Sos, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP.196910081995031006

PARAF HIERARKI	
Sekretaris	
Sub Koordinator PDE	
Pelaksana	



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Jalan Basuki Rahmat Nomor 1 Gedung B Lantai 3 Telepon (0380) 820532
KUPANG

Data Desa – Kelurahan Se-NTT Tahun 2023

No	Kabupaten/Kota	Kecamatan Thn 2023	Kelurahan Thn 2023	Jumlah Desa Tahun 2022			Jumlah Desa Thn 2023	Jumlah Desa Kelurahan Thn 2023
				Desa	Penambahan desa	Jumlah		
1	Kupang	24	17	160	-	160	160	177
2	Timur Tengah Selatan	32	12	266	-	266	266	278
3	Timur Tengah Utara	24	11	160	22	182	182	193
4	Belu	12	12	69	-	69	69	81
5	Alor	18	17	158	-	158	158	175
6	Flores Timur	19	21	229	-	229	229	250
7	Sikka	21	13	147	34	181	181	194
8	Ende	21	23	255	-	255	255	278
9	Ngada	12	16	135	55	190	190	206
10	Manggarai	12	26	145	-	145	145	171
11	Sumba Timur	22	16	140	-	140	140	156
12	Sumba Barat	6	11	63	-	63	63	74
13	Lembata	9	7	144	-	144	144	151
14	Rote Ndao	11	7	112	-	112	112	119
15	Manggarai Barat	12	5	164	-	164	164	169
16	Nagekeo	7	16	97	-	97	97	113
17	Sumba Tengah	6	0	65	-	65	65	65
18	Sumba Barat Daya	11	2	173	-	173	173	175
19	Manggarai Timur	12	17	159	-	159	159	176
20	Sabu Raijua	6	5	58	-	58	58	63
21	Malaka	12	-	127	-	127	127	127
22	Kota Kupang	6	51	-	-	-	-	51
Total		315	305	3026	111	3137	3.137	3.442

Kupang, Januari 2024

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Viktorius Manek, S.Sos. M.Si
Pembina Utama Madya
NIP.196910081995031006

PARAF HIERARKI	
Sekertaris	
Sub Koordinator PDE	
Pelaksana	




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Jalan Basuki Rahmat Nomor 1 Gedung B Lantai 3 Telepon (0380) 820532
K U P A N G




TINGKAT PERKEMBANGAN DESA DI NTT BERDASARKAN IDM
TAHUN 2023

No	Kabupaten	Jumlah Desa	Sangat Tertinggal	Tertinggal	Berkembang	Maju	Mandiri	Jumlah
1	Kupang	160	5	71	64	19	1	160
2	Timor Tengah Selatan	266	22	160	78	6	-	266
3	Timor Tengah Utara	182	1	64	113	4	-	182
4	Belu	69	-	11	49	9	-	69
5	Alor	158	8	84	60	6	-	158
6	Flores Timur	229	-	1	80	131	17	229
7	Sikka	181	10	47	95	26	3	181
8	Ende	255	-	113	133	9	-	255
9	Ngada	190	12	43	92	42	1	190
10	Manggarai	145	-	26	109	10	-	145
11	Sumba Timur	140	-	50	72	16	2	140
12	Sumba Barat	63	-	22	32	9	-	63
13	Lembata	144	7	50	76	10	1	144
14	Rote Ndao	112	-	23	77	12	-	112
15	Manggarai Barat	164	1	55	97	11	-	164
16	Nagekeo	97	-	17	67	12	1	97
17	Sumba Tengah	65	-	33	30	2	-	65
18	Sumba Barat Daya	173	5	113	52	3	-	173
19	Manggarai Timur	159	-	28	121	10	-	159
20	Sabu Raijua	58	4	46	8	-	-	58
21	Malaka	127	3	74	41	8	1	127
JUMLAH		3.137	78	1.131	1.546	355	27	3.137

Kupang, Januari 2024

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Provinsi Nusa Tenggara Timur


Viktorius Manek, S.Sos. M.Si
Pembina Utama Madya
NIP.196910081995031006

PARAF HIERARKI	
Sekertaris	
Sub Koordinator PDE	
Pelaksana	




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Jalan Basuki Rahmat Nomor 1 Gedung B Lantai 3 Telepon (0380) 820532
KUPANG




TINGKAT PERKEMBANGAN DESA DI NTT BERDASARKAN IDM
Tahun 2022-2023

No	Kabupaten	Jumlah Desa	Sangat Tertinggal		Selisih	Tertinggal		Selisih	Berkembang		Selisih	Maju		Selisih	Mandiri		Selisih
			2022	2023		2022	2023		2022	2023		2022	2023		2022	2023	
1	Kupang	160	10	5	-5	75	71	-4	65	64	-1	10	19	9	-	1	1
2	Timor Tengah Selatan	266	22	22	-	175	160	-15	64	78	14	5	6	1	-	-	-
3	Timor Tengah Utara	182	1	1	-	76	64	-12	81	113	32	2	4	2	-	-	-
4	Belu	69	-	-	-	-	11	-10	42	49	7	6	9	3	-	-	-
5	Alor	158	19	8	-11	82	84	2	53	60	7	4	6	2	-	-	-
6	Flores Timur	229	-	-	-	2	1	-1	109	80	-29	110	131	21	8	17	9
7	Sikka	181	2	10	8	45	47	2	79	95	16	21	26	5	-	3	3
8	Ende	255	2	-	-2	143	113	-30	105	133	28	5	9	4	-	-	-
9	Ngada	190	-	12	12	13	43	30	93	92	-1	28	42	14	1	1	0
10	Manggarai	145	-	-	-	44	26	-18	97	109	12	4	10	6	-	-	-
11	Sumba Timur	140	-	-	-	67	50	-17	69	72	3	2	16	14	2	2	0
12	Sumba Barat	63	-	-	-	25	22	-3	29	32	3	9	9	0	-	-	-
13	Lembata	144	7	7	-	61	50	-11	68	76	8	8	10	2	-	1	1
14	Rote Ndao	112	-	-	-	30	23	-7	71	77	6	11	12	1	-	-	-
15	Manggarai Barat	164	3	1	-2	90	55	-35	63	97	34	8	11	3	-	-	-
16	Nagekeo	97	-	-	-	23	17	-6	63	67	4	10	12	2	1	1	0
17	Sumba Tengah	65	-	-	-	44	33	-11	19	30	11	2	2	-	-	-	-

18	Sumba Barat Daya	173	9	5	-4	114	113	-1	47	52	5	3	3	-	-	-
19	Manggarai Timur	159	-	-	-	50	28	-22	102	121	19	7	10	3	-	-
20	Sabu Raijua	58	-	4	4	36	46	10	20	8	-12	2	-	-2	-	-
21	Malaka	127	6	3	-3	87	74	-13	32	41	9	2	8	6	-	1
JUMLAH		3.137	81	78		1303	1131		1.371	1546		259	355		12	27

Kupang, Januari 2024
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Provinsi Nusa Tenggara Timur


Viktorius Manek, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Madya
NIP.196910081995031006

PARAF HIERARKI	
Sekretaris	
Sub Koordinator PDE	
Pelaksana	



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Jalan Basuki Rachmat Nomor 1, Kelurahan Naikolan, Kecamatan Maulafa,
Kota Kupang Telepon (0380) 820532
K U P A N G

**DATA PENINGKATAN STATUS DESA TERTINGGAL KE DESA BERKEMBANG
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2023**

NO.	KABUPATEN	KECAMATAN	DESA	2022	2023	STATUS
1	KUPANG	SEMAU	UITAO	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MENINGKAT
2	KUPANG	SEMAU	HUILELOT	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MENINGKAT
3	KUPANG	SEMAU	LETBAUN	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MENINGKAT
4	KUPANG	KUPANG TIMUR	OESAO	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MENINGKAT
5	KUPANG	KUPANG TIMUR	OELATIMO	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MENINGKAT
6	KUPANG	FATULEU	NAUNNU	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MENINGKAT
7	KUPANG	FATULEU	TOLNAKU	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MENINGKAT
8	KUPANG	AMFOANG BARAT DAYA	MANUBELON	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MENINGKAT
9	KUPANG	AMFOANG BARAT DAYA	NEFONEUT	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MENINGKAT
10	KUPANG	AMFOANG TIMUR	NUNUANA	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MENINGKAT
11	KUPANG	AMFOANG TIMUR	NETEMNANU	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MENINGKAT
12	TTS	AMANUBAN TIMUR	PISAN	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MENINGKAT
13	TTS	AMANUBAN TENGAH	TAEBESA	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MENINGKAT
14	TTS	AMANUBAN TENGAH	TUMU	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MENINGKAT
15	TTS	AMANUBAN TENGAH	MAUNUM NIKI-NIKI	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MENINGKAT
16	TTS	AMANUBAN SELATAN	OEBELO	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MENINGKAT
17	TTS	AMANUBAN BARAT	PUSU	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MENINGKAT
18	TTS	AMANUBAN BARAT	NIFUKANI	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MENINGKAT
19	TTS	KI'E	FATUULAN	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MENINGKAT
20	TTS	KI'E	TESLAYOFANU	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MENINGKAT
21	TTS	KI'E	NEKMESE	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MENINGKAT
22	TTS	KUANFATU	LASI	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MENINGKAT
23	TTS	POLEN	LOLI	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MENINGKAT
24	TTS	BATU PUTIH	TUPAN	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MENINGKAT
25	TTS	BATU PUTIH	OEHELA	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MENINGKAT
26	TTS	KOLBANO	NOESIU	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MENINGKAT
27	TTS	KUALIN	NUNUSUNU	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MENINGKAT
28	TTS	KUALIN	TUAPAKAS	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MENINGKAT
29	TTS	KUALIN	KIUFATU	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MENINGKAT
30	TTS	MOLLO TENGAH	KUAEU	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MENINGKAT
31	TTS	NUNBENA	LILLANA	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MENINGKAT
32	TTU	MIOMAFFO TIMUR	FATUSENE	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MENINGKAT
33	TTU	MIOMAFFO BARAT	FATUTASU	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MENINGKAT
34	TTU	BIBOKI SELATAN	TUNBAEN	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MENINGKAT

NO.	KABUPATEN	KECAMATAN	DESA	2022	2023	STATUS
35	TTU	NOEMUTI	NOEBAUN	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MENINGKAT
36	TTU	NOEMUTI	POPNAM	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MENINGKAT
37	TTU	INSANA	NANSEAN	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MENINGKAT
38	TTU	INSANA	SUSULAKU	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MENINGKAT
39	TTU	INSANA	NANSEAN TIMUR	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MENINGKAT
40	TTU	NOEMUTI TIMUR	HAEKTO	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MENINGKAT
41	TTU	MIOMAFFO TENGAH	BIJAEPASU	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MENINGKAT
42	TTU	MIOMAFFO TENGAH	NIA N	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MENINGKAT
43	TTU	MUTIS	TASINIFU	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MENINGKAT
44	TTU	BIKOMI TENGAH	OENENU	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MENINGKAT
45	TTU	BIKOMI TENGAH	KUENAK	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MENINGKAT
46	TTU	INSANA FAFINESU	FAFINESU A	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MENINGKAT
47	TTU	INSANA FAFINESU	OENAIN	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MENINGKAT
48	TTU	INSANA FAFINESU	BAUNUAN	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MENINGKAT
49	TTU	BIBOKI MOENLEU	LUNIUP	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MENINGKAT
50	TTU	BIBOKI FEOTLEU	NAKU	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MENINGKAT
51	TTU	BIBOKI FEOTLEU	BIRUNATUN	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MENINGKAT
52	TTU	BIBOKI FEOTLEU	MAKUN	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MENINGKAT
53	TTU	BIBOKI FEOTLEU	MANUMEAN	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MENINGKAT
54	TTU	BIBOKI FEOTLEU	KULUAN	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MENINGKAT
55	BELU	LAMAKNEN	KEWAR	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MENINGKAT
56	BELU	LAMAKNEN	DUARATO	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MENINGKAT
57	BELU	TASIFETOTIMUR	TIALAI	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MENINGKAT
58	BELU	TASIFETO BARAT	LAWALUTOLUS	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MENINGKAT
59	BELU	RAIMANUK	RENROA	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MENINGKAT
60	BELU	LASOLAT	BAUDAOK	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MENINGKAT
61	BELU	LAMAKNEN SELATAN	HENES	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MENINGKAT
62	BELU	LAMAKNEN SELATAN	SISI FATUBERAL	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MENINGKAT
63	BELU	NANAET DUABESI	NANAET	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MENINGKAT
64	BELU	NANAET DUABESI	NANAENOE	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MENINGKAT
65	ALOR	ALOR BARAT LAUT	ALOR BESAR	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MENINGKAT
66	ALOR	ALOR BARAT LAUT	AIMOLI	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MENINGKAT
67	ALOR	ALOR BARAT LAUT	O'A MATE	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MENINGKAT
68	ALOR	ALOR BARAT DAYA	PROBUR	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MENINGKAT
69	ALOR	ALOR BARAT DAYA	PROBUR UTARA	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MENINGKAT
70	ALOR	PANTAR	WAILAWAR	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MENINGKAT
71	ALOR	PANTAR	BUKIT MAS	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MENINGKAT
72	ALOR	MATARU	MATARU SELATAN	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MENINGKAT
73	ALOR	MATARU	KAMAIFUI	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MENINGKAT
74	ALOR	PANTAR TIMUR	OMBAY	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MENINGKAT
75	ALOR	PANTAR TENGAH	MAUTA	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MENINGKAT
76	ALOR	PANTAR BARU LAUT	KALONDAMA BARAT	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MENINGKAT
77	FLORES TIMUR	SOLOR BARAT	LEWOTANAH OLE	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MENINGKAT
78	SIKKA	MEGO	BHERA	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MENINGKAT
79	SIKKA	MEGO	DOBO NUAPUU	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MENINGKAT
80	SIKKA	LELA	KOROWUWU	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MENINGKAT

NO.	KABUPATEN	KECAMATAN	DESA	2022	2023	STATUS
81	SIKKA	NITA	RIIT	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MENINGKAT
82	SIKKA	NITA	MAHEBORA	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MENINGKAT
83	SIKKA	PALUE	MALURIWU	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MENINGKAT
84	SIKKA	PALUE	TUANGGBO	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MENINGKAT
85	SIKKA	TALIBURA	OJANG	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MENINGKAT
86	SIKKA	TALIBURA	HIKONG	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MENINGKAT
87	SIKKA	TALIBURA	LEWOMADA	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MENINGKAT
88	SIKKA	TALIBURA	DARAT PANTAI	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MENINGKAT
89	SIKKA	WAIBLAMA	NATARMAGE	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MENINGKAT
90	SIKKA	WAIBLAMA	WIRANG	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MENINGKAT
91	SIKKA	WAIBLAMA	TUA BAO	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MENINGKAT
92	SIKKA	TANA WAWO	RENGGARASI	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MENINGKAT
93	SIKKA	TANA WAWO	DETUBINGA	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MENINGKAT
94	SIKKA	HEWOKLOANG	HEWOKLOANG	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MENINGKAT
95	SIKKA	DORENG	WOLOMOTONG	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MENINGKAT
96	ENDE	PULAU ENDE	REDORORY	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MENINGKAT
97	ENDE	ENDE	NDETUNDORA II	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MENINGKAT
98	ENDE	ENDE	NDETUNDORA III	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MENINGKAT
99	ENDE	ENDE	WORHOPAPA	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MENINGKAT
100	ENDE	ENDE	WAWONATO	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MENINGKAT
101	ENDE	ENDE	JEJARAJA	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MENINGKAT
102	ENDE	ENDE	RANORAMBA	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MENINGKAT
103	ENDE	ENDE	PEOZAKARAMBA	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MENINGKAT
104	ENDE	NDONA	WOLOTOPO	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MENINGKAT
105	ENDE	NDONA	NGALUROGA	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MENINGKAT
106	ENDE	NDONA	KELIKIKU	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MENINGKAT
107	ENDE	DETUSOKO	RANDORIA	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MENINGKAT
108	ENDE	WEWARIA	MAUTENDA	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MENINGKAT
109	ENDE	WEWARIA	MAUTENDA BARAT	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MENINGKAT
110	ENDE	WEWARIA	AEMURI	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MENINGKAT
111	ENDE	WEWARIA	NUMBA	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MENINGKAT
112	ENDE	WOLOWARU	RINDIWAWO	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MENINGKAT
113	ENDE	WOLOWARU	WOLOKOLI	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MENINGKAT
114	ENDE	WOLOWARU	TANA LO'O	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MENINGKAT
115	ENDE	WOLOJITA	TENDA	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MENINGKAT
116	ENDE	WOLOJITA	WIWIPEMO	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MENINGKAT
117	ENDE	WOLOJITA	PORA	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MENINGKAT
118	ENDE	WOLOJITA	NUAMULU	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MENINGKAT
119	ENDE	MAUROLE	NIRANUSA	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MENINGKAT
120	ENDE	LIO TIMUR	WOLOSAMBI	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MENINGKAT
121	ENDE	LIO TIMUR	WOLOARA	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MENINGKAT
122	ENDE	LIO TIMUR	DETUPERA	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MENINGKAT
123	ENDE	LIO TIMUR	LIABEKE	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MENINGKAT
124	ENDE	LIO TIMUR	RANGGATALO	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MENINGKAT
125	ENDE	KELIMUTU	NUAMURI BARAT	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MENINGKAT
126	ENDE	NDONA TIMUR	DEMULAKA	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MENINGKAT

NO.	KABUPATEN	KECAMATAN	DESA	2022	2023	STATUS
127	ENDE	NDORI	WONDA	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MENINGKAT
128	ENDE	NDORI	SERANDORI	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MENINGKAT
129	ENDE	NDORI	RATEMANGGA	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MENINGKAT
130	ENDE	NDORI	MAUBASA BARAT	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MENINGKAT
131	ENDE	LEPEMBUSU KELISOKE	RUTUJEJA	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MENINGKAT
132	NGADA	RIUNG	SAMBINASI	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MENINGKAT
133	NGADA	RIUNG	SAMBINASI BARAT	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MENINGKAT
134	NGADA	RIUNG BARAT	NGARA	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MENINGKAT
135	NGADA	RIUNG BARAT	LANAMAI I	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MENINGKAT
136	MANGGARAI	WAE RII	WAE MULU	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MENINGKAT
137	MANGGARAI	WAE RII	BANGKA JONG	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MENINGKAT
138	MANGGARAI	RUTENG	PONG LAO	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MENINGKAT
139	MANGGARAI	RUTENG	BANGKA LAO	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MENINGKAT
140	MANGGARAI	SATAR MESE	PONGKOR	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MENINGKAT
141	MANGGARAI	SATAR MESE	GOLO LAMBO	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MENINGKAT
142	MANGGARAI	SATAR MESE	SATAR LOUNG	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MENINGKAT
143	MANGGARAI	CIBAL	LADUR	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MENINGKAT
144	MANGGARAI	REOK	WATU BAUR	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MENINGKAT
145	MANGGARAI	SATAR MESE BARAT	BORIK	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MENINGKAT
146	MANGGARAI	RAHONG UTARA	DIMPONG	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MENINGKAT
147	MANGGARAI	RAHONG UTARA	WAE MANTANG	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MENINGKAT
148	MANGGARAI	LELAK	PONG UMPU	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MENINGKAT
149	MANGGARAI	REOK BARAT	LANTE	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MENINGKAT
150	MANGGARAI	REOK BARAT	TOE	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MENINGKAT
151	MANGGARAI	SATAR MESE UTARA	LING	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MENINGKAT
152	MANGGARAI	SATAR MESE UTARA	CIRENG	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MENINGKAT
153	SUMBA TIMUR	HAHARU	WUNGA	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MENINGKAT
154	SUMBA TIMUR	HAHARU	NAPU	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MENINGKAT
155	SUMBA TIMUR	LEWA	KAMBUHAPANG	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MENINGKAT
156	SUMBA TIMUR	NGGAHA ORI ANGU	TANDULA JANGGA	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MENINGKAT
157	SUMBA TIMUR	NGGAHA ORI ANGU	PRAIHAMBULI	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MENINGKAT
158	SUMBA TIMUR	TABUNDUNG	KUKI TALU	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MENINGKAT
159	SUMBA TIMUR	TABUNDUNG	WAIKANABU	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MENINGKAT
160	SUMBA TIMUR	PINU PAHAR	WAHANG	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MENINGKAT
161	SUMBA TIMUR	UMALULU	WATUPUDA	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MENINGKAT
162	SUMBA TIMUR	RINDI	HANGGARORU	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MENINGKAT
163	SUMBA TIMUR	KAHAUNGU ETI	KAMBATABUNDUNG	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MENINGKAT
164	SUMBA TIMUR	KAHAUNGU ETI	KOTA KAWAU	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MENINGKAT
165	SUMBA TIMUR	KAMBATA MAPAMBUHANG	LUKUWINGIR	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MENINGKAT
166	SUMBA TIMUR	KAMBATA MAPAMBUHANG	WAIMBIDI	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MENINGKAT
167	SUMBA TIMUR	KAMBATA MAPAMBUHANG	MARADA MUNDI	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MENINGKAT
168	SUMBA TIMUR	LEWA TIDAHU	LAIHIAU	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MENINGKAT
169	SUMBA TIMUR	KATALA HAMU LINGU	MANDAHU	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MENINGKAT
170	SUMBA BARAT	TANA RIGHU	MANU MADA	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MENINGKAT
171	SUMBA BARAT	LOLI	UBU RAYA	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MENINGKAT

NO.	KABUPATEN	KECAMATAN	DESA	2022	2023	STATUS
172	SUMBA BARAT	LAMBOYA	BODO HULA	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MENINGKAT
173	SUMBA BARAT	LABOYA BARAT	WEE TANA	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MENINGKAT
174	SUMBA BARAT	LABOYA BARAT	HARONA KALLA	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MENINGKAT
175	LEMBATA	NAGA WUTUNG	ATAWAI	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MENINGKAT
176	LEMBATA	NAGA WUTUNG	TEWAOWUTUNG	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MENINGKAT
177	LEMBATA	ILE APE	PETUNTAWA	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MENINGKAT
178	LEMBATA	NUBATUKAN	BAOLANGU	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MENINGKAT
179	LEMBATA	NUBATUKAN	BELOBATANG	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MENINGKAT
180	LEMBATA	NUBATUKAN	UDAK MELOMATA	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MENINGKAT
181	LEMBATA	NUBATUKAN	LITE ULU MADO	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MENINGKAT
182	LEMBATA	OMESURI	LEUBATANG	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MENINGKAT
183	LEMBATA	OMESURI	MELUWITING	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MENINGKAT
184	LEMBATA	BUYASURI	BENIHADING II	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MENINGKAT
185	LEMBATA	ILE APE TIMUR	LAMAAU	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MENINGKAT
186	ROTE NDAO	ROTE BARAT DAYA	OESILI	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MENINGKAT
187	ROTE NDAO	ROTE BARAT DAYA	OEBATU	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MENINGKAT
188	ROTE NDAO	ROTE BARAT DAYA	FUAFUNI	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MENINGKAT
189	ROTE NDAO	LOBALAIN	BEBALAIN	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MENINGKAT
190	ROTE NDAO	LOBALAIN	SUELAIN	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MENINGKAT
191	ROTE NDAO	PANTAI BARU	OEBAU	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MENINGKAT
192	ROTE NDAO	PANTAI BARU	KEOEN	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MENINGKAT
193	MANGGARAI BARAT	KUWUS	COAL	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MENINGKAT
194	MANGGARAI BARAT	KUWUS	PANGGA	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MENINGKAT
195	MANGGARAI BARAT	KUWUS	LEWUR	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MENINGKAT
196	MANGGARAI BARAT	KUWUS	BENTENG SURU	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MENINGKAT
197	MANGGARAI BARAT	KUWUS	SAMA	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MENINGKAT
198	MANGGARAI BARAT	KUWUS	BANGKA LEWAT	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MENINGKAT
199	MANGGARAI BARAT	KUWUS	SUKA KIONG	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MENINGKAT
200	MANGGARAI BARAT	SANO NGGOANG	GOLO SENGANG	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MENINGKAT
201	MANGGARAI BARAT	SANO NGGOANG	WATU PANGGAL	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MENINGKAT
202	MANGGARAI BARAT	KOMODO	GOLO MORI	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MENINGKAT
203	MANGGARAI BARAT	KOMODO	MACANG TANGGAR	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MENINGKAT
204	MANGGARAI BARAT	KOMODO	WATU NGGELEK	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MENINGKAT
205	MANGGARAI BARAT	KOMODO	TIWU NAMPAR	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MENINGKAT
206	MANGGARAI BARAT	KOMODO	COMPANG LONGGO	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MENINGKAT
207	MANGGARAI BARAT	KOMODO	PANTAR	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MENINGKAT
208	MANGGARAI BARAT	BOLENG	GOLO KETAK	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MENINGKAT
209	MANGGARAI BARAT	BOLENG	TANJUNG BOLENG	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MENINGKAT
210	MANGGARAI BARAT	BOLENG	PONTIANAK	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MENINGKAT
211	MANGGARAI BARAT	BOLENG	BATU TIGA	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MENINGKAT
212	MANGGARAI BARAT	WELAK	PONG WELAK	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MENINGKAT
213	MANGGARAI BARAT	NDOSO	RAKA	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MENINGKAT
214	MANGGARAI BARAT	NDOSO	KASONG	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MENINGKAT
215	MANGGARAI BARAT	NDOSO	MOMOL	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MENINGKAT
216	MANGGARAI BARAT	NDOSO	PONG NARANG	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MENINGKAT
217	MANGGARAI BARAT	NDOSO	GOLO BORE	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MENINGKAT




NO.	KABUPATEN	KECAMATAN	DESA	2022	2023	STATUS
218	MANGGARAI BARAT	NDOSO	PATENG LESUH	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MENINGKAT
219	MANGGARAI BARAT	NDOSO	GOLO RU'A	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MENINGKAT
220	MANGGARAI BARAT	LEMBOR SELATAN	LENDONG	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MENINGKAT
221	MANGGARAI BARAT	MBELILING	TIWI RIWUNG	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MENINGKAT
222	MANGGARAI BARAT	MBELILING	COMPANG LIANG NDARA	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MENINGKAT
223	MANGGARAI BARAT	PACAR	BENTENG NDOPE	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MENINGKAT
224	MANGGARAI BARAT	PACAR	GOLO LAJANG	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MENINGKAT
225	MANGGARAI BARAT	PACAR	KOMBO	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MENINGKAT
226	MANGGARAI BARAT	PACAR	KOMBO TENGAH	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MENINGKAT
227	MANGGARAI BARAT	KUWUS BARAT	GOLO LEWE	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MENINGKAT
228	MANGGARAI BARAT	KUWUS BARAT	TUENG	MAJU	BERKEMBANG	MENINGKAT
229	MANGGARAI BARAT	KUWUS BARAT	WAJUR	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MENINGKAT
230	NAGEKEO	MAUPONGGO	BELA	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MENINGKAT
231	NAGEKEO	MAUPONGGO	WOLOEDE	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MENINGKAT
232	NAGEKEO	MAUPONGGO	LAJAWAJO	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MENINGKAT
233	NAGEKEO	WOLOWAE	TOTOMALA	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MENINGKAT
234	NAGEKEO	KEO TENGAH	KOTOWUJI TIMUR	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MENINGKAT
235	NAGEKEO	KEO TENGAH	LADOLIMA TIMUR	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MENINGKAT
236	SUMBA TENGAH	KATIKU TANA	UMBU RIRI	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MENINGKAT
237	SUMBA TENGAH	KATIKU TANA	DEWA JARA	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MENINGKAT
238	SUMBA TENGAH	UMBU RATU NGGAY BARAT	DEWA TANA	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MENINGKAT
239	SUMBA TENGAH	MAMBORO	OLE ATE	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MENINGKAT
240	SUMBA TENGAH	UMBU RATU NGGAY	MBILUR PANGADU	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MENINGKAT
241	SUMBA TENGAH	UMBU RATU NGGAY	TANA MBANAS	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MENINGKAT
242	SUMBA TENGAH	UMBU RATU NGGAY	TANA MBANAS SELATAN	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MENINGKAT
243	SUMBA TENGAH	UMBU RATU NGGAY	TANA MBANAS BARAT	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MENINGKAT
244	SUMBA TENGAH	UMBU RATU NGGAY	NGADU OLU	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MENINGKAT
245	SUMBA TENGAH	KATIKU TANA SELATAN	OKA WACU	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MENINGKAT
246	SUMBA TENGAH	UMBU RATU NGGAY TENGAH	SAMBALI LOKU	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MENINGKAT
247	SBD	WEWEWA SELATAN	WERI LOLO	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MENINGKAT
248	SBD	KODI BANGEDO	WALLA NDIMU	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MENINGKAT
249	SBD	KODI UTARA	MAGHO LINTO	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MENINGKAT
250	SBD	WEWEWA TENGAH	WEE RAME	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MENINGKAT
251	SBD	WEWEWA TENGAH	KADI ROMA	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MENINGKAT
252	MANGGARAI TIMUR	LAMBA LEDA SELATAN	GOLO NDARI	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MENINGKAT
253	MANGGARAI TIMUR	SAMBI RAMPAS	WELA LADA	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MENINGKAT
254	MANGGARAI TIMUR	ELAR	GOLO MUNDE	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MENINGKAT
255	MANGGARAI TIMUR	ELAR	GOLO LEBO	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MENINGKAT
256	MANGGARAI TIMUR	ELAR	COMPANG SOBA	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MENINGKAT
257	MANGGARAI TIMUR	KOTA KOMBA	LEMBUR	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MENINGKAT
258	MANGGARAI TIMUR	KOTA KOMBA	GUNUNG	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MENINGKAT
259	MANGGARAI TIMUR	KOTA KOMBA	KOMBA	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MENINGKAT
260	MANGGARAI TIMUR	KOTA KOMBA	BAMO	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MENINGKAT
261	MANGGARAI TIMUR	KOTA KOMBA	PONG RUAN	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MENINGKAT
262	MANGGARAI TIMUR	RANA MESE	SANO LOKOM	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MENINGKAT
263	MANGGARAI TIMUR	RANA MESE	GOLO RUTUK	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MENINGKAT

KABUPATEN	KECAMATAN	DESA	2022	2023	STATUS
MANGGARAI TIMUR	RANA MESE	GOLO MELENG	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MENINGKAT
MANGGARAI TIMUR	RANA MESE	WAE NGGORI	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MENINGKAT
MANGGARAI TIMUR	RANA MESE	BANGKA KEMPO	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MENINGKAT
MANGGARAI TIMUR	RANA MESE	COMPANG LONI	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MENINGKAT
MANGGARAI TIMUR	ELAR SELATAN	TENO MESE	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MENINGKAT
MANGGARAI TIMUR	KOTA KOMBA UTARA	MOKEI MORID	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MENINGKAT
MANGGARAI TIMUR	KOTA KOMBA UTARA	WATU PARI	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MENINGKAT
MANGGARAI TIMUR	LAMBA LEDA UTARA	LENCUR	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MENINGKAT
MANGGARAI TIMUR	CONGKAR	GOLO NGAWAN	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MENINGKAT
MANGGARAI TIMUR	CONGKAR	GOLO PARI	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MENINGKAT
SABU RADUA	SABU BARAT	RAEMADIA	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MENINGKAT
MALAKA	MALAKA TENGAH	UMANEN LAWALU	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MENINGKAT
MALAKA	MALAKA TENGAH	KLETEK	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MENINGKAT
MALAKA	MALAKA TENGAH	NAIMANA	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MENINGKAT
MALAKA	MALAKA TENGAH	SUAI	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MENINGKAT
MALAKA	MALAKA BARAT	MOTAULUN	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MENINGKAT
MALAKA	MALAKA BARAT	LASAEN	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MENINGKAT
MALAKA	MALAKA BARAT	MAKITHAN	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MENINGKAT
MALAKA	MALAKA BARAT	RABASA	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MENINGKAT
MALAKA	MALAKA BARAT	MOTAAIN	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MENINGKAT
MALAKA	WEWIKU	HALIBASAR	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MENINGKAT
MALAKA	WEWIKU	BADARAI	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MENINGKAT
MALAKA	WEWIKU	SESERAI	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MENINGKAT
MALAKA	WEWIKU	RABASA BIRIS	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MENINGKAT
MALAKA	WEWIKU	WESEBEN	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MENINGKAT
MALAKA	WELIMAN	LALITEN	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MENINGKAT
MALAKA	WELIMAN	UMALAWAIN	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MENINGKAT
MALAKA	BOTIN LOBELE	BABOTIN SELATAN	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MENINGKAT

number Data Indeks Desa Membangun Kemendesa PDTT Tahun 2023

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
Provinsi Nusa Tenggara Timur,

Viktorius Manek, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19691008 199503 1 006

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS	
SUB KOORDINATOR PDE	
PELAKSANA	



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Jalan Basuki Rachmat Nomor 1, Kelurahan Nuikolan, Kecamatan Maulafa,
Kota Kupang Telepon (0380) 820532
K U P A N G

**DATA PENINGKATAN STATUS DESA BERKEMBANG KE DESA MAJU
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2023**

NO.	KABUPATEN	KECAMATAN	DESA	2022	2023	STATUS
1	KUPANG	SEMAU	HIANSISI	BERKEMBANG	MAJU	MENINGKAT
2	KUPANG	KUPANG BARAT	OEMATNUNU	BERKEMBANG	MAJU	MENINGKAT
3	KUPANG	KUPANG BARAT	NITNEO	BERKEMBANG	MAJU	MENINGKAT
4	KUPANG	KUPANG BARAT	BOLOK	BERKEMBANG	MAJU	MENINGKAT
5	KUPANG	KUPANG TIMUR	TUAPUKAN	BERKEMBANG	MAJU	MENINGKAT
6	KUPANG	KUPANG TIMUR	OEFABI	BERKEMBANG	MAJU	MENINGKAT
7	KUPANG	KUPANG TIMUR	TANAH PUTIH	BERKEMBANG	MAJU	MENINGKAT
8	KUPANG	AMARASI	PONAIN	BERKEMBANG	MAJU	MENINGKAT
9	KUPANG	AMFOANG TIMUR	NETEMNANU UTARA	BERKEMBANG	MAJU	MENINGKAT
10	KUPANG	FATULEU TENGAH	NUNSAEN	BERKEMBANG	MAJU	MENINGKAT
11	TTS	BATU PUTIH	OBOBO	BERKEMBANG	MAJU	MENINGKAT
12	TTU	BIKOMI SELATAN	NAIOLA	BERKEMBANG	MAJU	MENINGKAT
13	BELU	LAMAKNEN	DIRUN	BERKEMBANG	MAJU	MENINGKAT
14	BELU	NANAET DUABESI	FOHOEKA	BERKEMBANG	MAJU	MENINGKAT
15	ALOR	TELUK MUTIARA	MOTONGBANG	BERKEMBANG	MAJU	MENINGKAT
16	ALOR	PANTAR BARAT	BARANUSA	BERKEMBANG	MAJU	MENINGKAT
17	ALOR	PANTAR BARAT	BLANG MERANG	BERKEMBANG	MAJU	MENINGKAT
18	FLORES TIMUR	TITEHENA	KOBASOMA	BERKEMBANG	MAJU	MENINGKAT
19	FLORES TIMUR	TITEHENA	KONGA	BERKEMBANG	MAJU	MENINGKAT
20	FLORES TIMUR	TITEHENA	ADABANG	BERKEMBANG	MAJU	MENINGKAT
21	FLORES TIMUR	ILE MANDIRI	HALAKODANUAN	BERKEMBANG	MAJU	MENINGKAT
22	FLORES TIMUR	TANJUNG BUNGA	BAHINGA	BERKEMBANG	MAJU	MENINGKAT
23	FLORES TIMUR	TANJUNG BUNGA	WAIBAO	BERKEMBANG	MAJU	MENINGKAT
24	FLORES TIMUR	TANJUNG BUNGA	KOLAKA	BERKEMBANG	MAJU	MENINGKAT
25	FLORES TIMUR	SOLOR BARAT	BALAWELING II	BERKEMBANG	MAJU	MENINGKAT
26	FLORES TIMUR	SOLOR BARAT	BALAWELING I	BERKEMBANG	MAJU	MENINGKAT
27	FLORES TIMUR	SOLOR BARAT	ONGALERENG	BERKEMBANG	MAJU	MENINGKAT
28	FLORES TIMUR	SOLOR BARAT	KARAWATUNG	BERKEMBANG	MAJU	MENINGKAT
29	FLORES TIMUR	SOLOR BARAT	DANIWATO	BERKEMBANG	MAJU	MENINGKAT
30	FLORES TIMUR	SOLOR TIMUR	LEWOHEDO	BERKEMBANG	MAJU	MENINGKAT
31	FLORES TIMUR	SOLOR TIMUR	LOHAYONG II	BERKEMBANG	MAJU	MENINGKAT
32	FLORES TIMUR	WOTAN ULUMANDO	WAILEBE	BERKEMBANG	MAJU	MENINGKAT
33	FLORES TIMUR	KELUBAGOLIT	ADOLABA	BERKEMBANG	MAJU	MENINGKAT
34	FLORES TIMUR	KELUBAGOLIT	LAMAPAHA	BERKEMBANG	MAJU	MENINGKAT
35	FLORES TIMUR	KELUBAGOLIT	MUDA	BERKEMBANG	MAJU	MENINGKAT



NO.	KABUPATEN	KECAMATAN	DESA	2022	2023	STATUS
36	FLORES TIMUR	WITHAMA	WATOLOLONG	BERKEMBANG	MAJU	MENINGKAT
37	FLORES TIMUR	WITHAMA	LAMALEKA	BERKEMBANG	MAJU	MENINGKAT
38	FLORES TIMUR	WITHAMA	BALAWELING NOTEN	BERKEMBANG	MAJU	MENINGKAT
39	FLORES TIMUR	DEMON PAGONG	LEWOKLUOK	BERKEMBANG	MAJU	MENINGKAT
40	FLORES TIMUR	DEMON PAGONG	BAMA	BERKEMBANG	MAJU	MENINGKAT
41	FLORES TIMUR	ILE BURA	RIANGBARING	BERKEMBANG	MAJU	MENINGKAT
42	FLORES TIMUR	ADONARA	TIKATUKAN	BERKEMBANG	MAJU	MENINGKAT
43	FLORES TIMUR	ADONARA	NISA NULAN	BERKEMBANG	MAJU	MENINGKAT
44	FLORES TIMUR	ADONARA	KOLIPETUNG	BERKEMBANG	MAJU	MENINGKAT
45	FLORES TIMUR	ADONARA TENGAH	HOROWURA	BERKEMBANG	MAJU	MENINGKAT
46	FLORES TIMUR	ADONARA TENGAH	NUBALEMA	BERKEMBANG	MAJU	MENINGKAT
47	FLORES TIMUR	SOLOR SELATAN	KELIKE AIMATAN	BERKEMBANG	MAJU	MENINGKAT
48	SIKKA	ALOK	GUNUNG SARI	BERKEMBANG	MAJU	MENINGKAT
49	SIKKA	TALIBURA	NANGAHAE	BERKEMBANG	MAJU	MENINGKAT
50	SIKKA	KEWAPANTE	NAMANGKEWA	BERKEMBANG	MAJU	MENINGKAT
51	SIKKA	KEWAPANTE	WAIARA	BERKEMBANG	MAJU	MENINGKAT
52	SIKKA	KEWAPANTE	WAIKOJA	BERKEMBANG	MAJU	MENINGKAT
53	SIKKA	MAGEPANDA	KOLISIA B	BERKEMBANG	MAJU	MENINGKAT
54	SIKKA	KANGAE	WATULIWUNG	BERKEMBANG	MAJU	MENINGKAT
55	ENDE	NANGAPANDA	NDORUREA I	BERKEMBANG	MAJU	MENINGKAT
56	ENDE	WOLOJITA	NGGELA	BERKEMBANG	MAJU	MENINGKAT
57	ENDE	MAUROLE	MAUSAMBI	BERKEMBANG	MAJU	MENINGKAT
58	ENDE	NDORI	MAUBASA	BERKEMBANG	MAJU	MENINGKAT
59	NGADA	AIMERE	KILA	BERKEMBANG	MAJU	MENINGKAT
60	NGADA	BAJAWA	BOMARI	BERKEMBANG	MAJU	MENINGKAT
61	NGADA	BAJAWA	BEIWALI	BERKEMBANG	MAJU	MENINGKAT
62	NGADA	SOA	MASUMELI	BERKEMBANG	MAJU	MENINGKAT
63	NGADA	SOA	PIGA	BERKEMBANG	MAJU	MENINGKAT
64	NGADA	SOA	MANGERUDA	BERKEMBANG	MAJU	MENINGKAT
65	NGADA	SOA	LIBUNIO	BERKEMBANG	MAJU	MENINGKAT
66	NGADA	SOA	NGABHEO	BERKEMBANG	MAJU	MENINGKAT
67	NGADA	SOA	BOGOBOA	BERKEMBANG	MAJU	MENINGKAT
68	NGADA	RIUNG	WANGKA	BERKEMBANG	MAJU	MENINGKAT
69	NGADA	RIUNG	RAWANGKALO	BERKEMBANG	MAJU	MENINGKAT
70	NGADA	JEREBUU	NENOWEA	BERKEMBANG	MAJU	MENINGKAT
71	MANGGARAI	WAE RII	WAE RII	BERKEMBANG	MAJU	MENINGKAT
72	MANGGARAI	SATAR MESE	TAL	BERKEMBANG	MAJU	MENINGKAT
73	MANGGARAI	CIBAL	NENU	BERKEMBANG	MAJU	MENINGKAT
74	MANGGARAI	SATAR MESE BARAT	TERONG	BERKEMBANG	MAJU	MENINGKAT
75	MANGGARAI	SATAR MESE BARAT	CEKA LUJU	BERKEMBANG	MAJU	MENINGKAT
76	SUMBA TIMUR	HAHARU	RAMBANGARU	BERKEMBANG	MAJU	MENINGKAT
77	SUMBA TIMUR	HAHARU	KADAHANG	BERKEMBANG	MAJU	MENINGKAT
78	SUMBA TIMUR	NGGAHA ORI ANGU	MAKAMENGGIT	BERKEMBANG	MAJU	MENINGKAT
79	SUMBA TIMUR	NGGAHA ORI ANGU	TANATUKU	BERKEMBANG	MAJU	MENINGKAT
80	SUMBA TIMUR	TABUNDUNG	BILLA	BERKEMBANG	MAJU	MENINGKAT
81	SUMBA TIMUR	PANDAWAI	PALAKA HEMBI	BERKEMBANG	MAJU	MENINGKAT

NO.	KABUPATEN	KECAMATAN	DESA	2022	2023	STATUS
82	SUMBA TIMUR	UMALULU	PATAWANG	BERKEMBANG	MAJU	MENINGKAT
83	SUMBA TIMUR	UMALULU	WANGA	BERKEMBANG	MAJU	MENINGKAT
84	SUMBA TIMUR	UMALULU	MATAWAI ATU	BERKEMBANG	MAJU	MENINGKAT
85	SUMBA TIMUR	PAHUNGA LODU	MBURUKULU	BERKEMBANG	MAJU	MENINGKAT
86	SUMBA TIMUR	KAMBERA	KIRITANA	BERKEMBANG	MAJU	MENINGKAT
87	SUMBA TIMUR	KATALA HAMU LINGU	KOMPA PARI	BERKEMBANG	MAJU	MENINGKAT
88	SUMBA TIMUR	KANATANG	HAMBAPRAING	BERKEMBANG	MAJU	MENINGKAT
89	SUMBA TIMUR	KANATANG	MONDU	BERKEMBANG	MAJU	MENINGKAT
90	SUMBA BARAT	LABOYA BARAT	GAURA	BERKEMBANG	MAJU	MENINGKAT
91	LEMBATA	ILE APE	NAPASABOK	BERKEMBANG	MAJU	MENINGKAT
92	LEMBATA	ILE APE	WATODIRI	BERKEMBANG	MAJU	MENINGKAT
93	LEMBATA	ILE APE	LAMAWARA	BERKEMBANG	MAJU	MENINGKAT
94	ROTE NDAO	ROTE BARAT	BO'A	BERKEMBANG	MAJU	MENINGKAT
95	MANGGARAI BARAT	KOMODO	WARLOKA	BERKEMBANG	MAJU	MENINGKAT
96	MANGGARAI BARAT	BOLENG	GOLO SEPANG	BERKEMBANG	MAJU	MENINGKAT
97	MANGGARAI BARAT	PACAR	COMPANG	BERKEMBANG	MAJU	MENINGKAT
98	NAGEKEO	BOAWAE	KELEWAE	BERKEMBANG	MAJU	MENINGKAT
99	NAGEKEO	MAUPONGGO	MAUKELI	BERKEMBANG	MAJU	MENINGKAT
100	MANGGARAI TIMUR	SAMBI RAMPAS	NANGA MBAUR	BERKEMBANG	MAJU	MENINGKAT
101	MANGGARAI TIMUR	SAMBI RAMPAS	NAMPAR SEPANG	BERKEMBANG	MAJU	MENINGKAT
102	MANGGARAI TIMUR	CONGKAR	SATAR NAWANG	BERKEMBANG	MAJU	MENINGKAT
103	MALAKA	MALAKA TENGAH	KAMANASA	BERKEMBANG	MAJU	MENINGKAT
104	MALAKA	MALAKA TENGAH	FAHILUKA	BERKEMBANG	MAJU	MENINGKAT
105	MALAKA	MALAKA TENGAH	LAWALU	BERKEMBANG	MAJU	MENINGKAT
106	MALAKA	MALAKA BARAT	BESIKAMA	BERKEMBANG	MAJU	MENINGKAT
107	MALAKA	WEWIKU	WEBRIAMATA	BERKEMBANG	MAJU	MENINGKAT
108	MALAKA	WEWIKU	ALKANI	BERKEMBANG	MAJU	MENINGKAT
109	MALAKA	KOBALIMA	LITAMALI	BERKEMBANG	MAJU	MENINGKAT

Sumber Data Indeks Desa Membangun Kemendesa PDTT Tahun 2023

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
Provinsi Nusa Tenggara Timur,

Viktorius Manek, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19691008 199503 1 006

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS	
SUB KOORDINATOR PDE	
PELAKSANA	